ANALISIS PERAN BUMNAG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI NAGARARI KOTO GADANG JAYA KABUPATEN PASAMAN BARAT

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi Ekonomi Islam

Oleh :

Ibnu Agung Ismail
NIM: 3218212

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SJECH M. DJHAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
2023 / 1444 H

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Ibnu Agung Ismail
Nim	: 3218212
Tempat/Tanggal Lahir	: Koto Gadang Jaya, 13 Maret 1998
Program Studi	: Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Analisis Peran Bumnag Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Nagarari Koto Gadang Jaya Kabupaten Pasaman Barat

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) saya dengan judul diatas adalah asli karya penulis. Apabila dkemudian hari ditemukan dan terbukti bahwa Skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar sarjana yang melekat pada penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaiman mestinya.

Bukittinggi, 03 Oktober 2023

Penulis

Ibnu Agung Ismail
NIM. 3218212

Abstrak

Tujuan peneltian ini untuk mengetahui Peran BUMNag Kendala BUMNag dalam meningkatkan kesejateraan masyarakat Di nagari Koto Gadang Jaya Kabupaten Pasaman Barat dan untuk dapat mengetahui.

Metode penelitian deksriptif kualitatif. Penelitian ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta. Penelitian ini dilaksanakan di Di Desa Koto Gadang Jaya Kabupaten Pasaman Barat" Waktu penelitian dimulai dari Bulan Januari 2023 sampai selesai. Data penelitian menggunkan data skunder dan primer yang diperoleh secara langsung dari subjek peneltian. Informan dalam penelitian adalah Seluruh anggota atau jajaran Pengelola BUMdes Koto Gadang Jaya serta Tokoh masyarakat Koto Gadang Jaya yang terlibat di operasional BUMdes. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan infoman.Teknis analisis data *Reduction*, *Display*, dan *Conclusion drawing*.

Hasil penelitian Peran badan usaha milik nagari BUMNag Koto Gadang Jaya yang utama dilakukan dalam menjalankan usaha yakni memerlukan strategi dalam upaya pencapaian target hal ini dikarenakan peran BUMNag Koto Gadang Jaya sebagai pembangunan ekonomi menjadi salah satu cara meningkatkan ekonomi nasional. Nagari merupakan pemerintahan terbawah yang langsung berhubungan dengan masyarakat dan langsung menjangkau sasaran riil dari pembangunan, untuk menunjang pertumbuhan ekonomi maka dibutuhkan program yang mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat Nagari. Dan Kendala yang dihadapi BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya yang sering terjadi yaitu keseriusan para pemiliki modal dalam menyalurkan modal yang masih tergolong minim, kesulitan keuangan yang paling mendasar terjadi disetiap saat di BUMNag Koto Gadang Jaya. BUMNag Koto Gadang Jaya sering mengalami kerugian diakibatkan dalam mengambil keputusan lebih cendrung mementingkan keperluan orang banyak. Pada prosesnya, pemerintahan desa atau setingkatnya dalam mendirikan BUMNag harus memperhatikan beberapa hal agar pendirian BUMNag bisa bermanfaat bagi masyarakat seperti memperhatikan inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa, potensi usaha ekonomi desa, sumber daya alam di desa, sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMNag.

Kata Kunci: Peran, Kendala, BUMnag

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillahi Robbila'alamin, Dengan segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sebgaimana waktu yang telah ditentukan. Serta Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mewariskan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai petunjuk kebenaran sampai akhir zaman yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti apa yang kita rasakan saat ini yang penuh dengan kecanggihan teknologikal.

Skripsi ini di susun sebagai Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana pada Program Studi Ekonomi Islam adapun judul tesis adalah "**Analisis Peran Bumnag Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Nagarari Koto Gadang Jaya Kabupaten Pasaman Barat"**

Dalam proses penyusunan naskah penulisan dalam bentuk Tesis sangat banyak hambatan dan rintangan yang melanda penulis hingga pada akhirnya dapat melewatinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Maka dari itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih banyak kepada keluarga terutama kepada Ibunda tercinta Suyamah dan ayahanda tercinta Pariman, dan Kakak Kandung saya yakni Alif Yayendra dan beserta keluarga tercinta yang telah banyak membantu dan mendukung baik secara moril dan materil yang memberikan kontribusi dalam memotivasi saya dalam meyelesaikan Skripsi ini sebagaimana hasil yang mampu

memenuhi syarat untuk menjadi lulusan Sarjana Ekonomi Islam, selanjutnya dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada;

1. Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M. Hum beserta jajaran petinggi Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Ibu Dr. Hesi Eka Putri, SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Bapak Rika widianita, ME, Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Bapak Andis Febrian, MM selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk perihal bimbigan demi menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
5. Bapak Yuarman Mansur SE., MM Selaku dosen penasehat akademik
6. Bapak/ Ibu pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak/ ibu dosen serta karyawan Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
8. Masyarakat Nagari Koto Gadang Jaya, Kabupten Pasaman Barat telah mengiklhaskan dalam meluangkan waktu dan membantu demi kelancaran penelitian ini, terima kasih atas bantuannya.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis selama menyelesaikan studi di

UIN Bukittinggi tanpa terkecuali yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

10. Temen kos yang selalu banguin kalo masuk pagi dan yang selalu bisa diajak mabar Amir alfarabi dan Arham
11. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Ekonomi Islam Angkatan 2018 yang telah membersamai saya dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah dalam bentuk Tesis.

Penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuannya yang telah diberikan, semoga amalan dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga pahalanya disisi Allah SWT, Aamiiin ya Rabbal ‘aalamiiin. Dalam hal ini penulis mohon maaf apabila ditemukan kekurangan dan kesalahan dalam penulisan tesis ini, dimohonkan saran dan kritikannya. Atas saran dan kritikan yang diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Bukittinggi 02 November 2023
Penulis

Ibnu Agung Ismail
NIM: 3218212

DAFTAR ISI

Surat Peryataan Orisinal Litas i
Abstrak ii
Kata Pengentar iii
Daftar Isi vi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakangn Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Batasan Masalah 8
D. Rumusan Masalah 8
E. Tujuan Penelitian 8
F. Manfaat Penelitian 9
G. Penjelasan Judul 10
BAB II LANDASAN TEORI
A. Badan Usaha Miliki Nagari 11
1. Pengertian BUMNag 11
2. Peran BUMNag Terhadap Meningkatan Perekonomian Masyarakat 14
3. Prinsip Pengelolaan BUMNag 14
4. Pendirian BUMnag 16
5. Manfaat dan Tujuan Kajian Kelayakan Penentuan Unit Usaha BUMnag 17
B. Kesejahteraan Masyarakat 19
1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat 19
2. Terwujundnya Masyarakat Sejahtera 19
3. Indikator Kesejahteraan 21
4. Kesejateraan Menurut Ekonomi Islam 23
C. Pendapatan 26
1. Pengertian Pendapatan 26
2. Landasan Syariah Mengenai Pendapatan 27
D. Kajian Terdahulu 30
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 25
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 25
C. Jenis dan Sumber Data 25
D. Informan Penelitian 36
E. Teknik Pengumpulan Data 36
F. Teknik Analisis Data 37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Profil BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya 39
1. Sejarah berdiri BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya 39
2. Visi Dan Misi BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya 40
3. Struktur Organisasi BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya 41
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 42
1. Peran BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya 42

2. Kendala BUMNag Koto Gadang Jaya
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan.....54
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan.....69
B. Saran 70
DAFTAR PUSTAK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan memiliki jumlah provinsi sebanyak 38 Provinsi dan 4016 Kabupaten/Kota. Dan terdapat 8.616 jumlah desa yang terdaapat dalam negara Indonesia. Proses pembangunan ekonomi diseluruh penjuru Indonesia tidak terlepas dari peran aktif dari pemerintahan baik di desa maupun daerah perkotaan dikota yang ditugaskan untuk mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya[1].

Pengelolaan sumber daya manusia dan alam sudah ditetapkan dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah memberikan keleluasaan pengelolaan kepada pemerintah Nagari sebagai upaya mengantar Nagari yang otonom dalam membangun dan mengembangkan daerahnya melalui jalan pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)[2]. Badan Usaha Milik Milik Nagari (BUMNag) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan Nagari dalam upaya memperkuat perekonomian Nagari dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di Nagari berdasarkan (Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.

[1] Enike Tje Yustin Dima, 'Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa Kuanheun Kabupaten Kupang Barat', *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1.3 (2022), 612–18.

[2] Khairinnisa and Citra Indah Merina, 'SEIKO : Journal of Management & Business Analisis Kontribusi Pengelolaan BUMDes Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Pendapatan Asli Desa Di Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul', *Journal of Management & Business ISSN*, 4.3 (2022), 104–12 <https://doi.org/10.37531/sejaman.v4i3.2399>.

BUMNag adalah lembaga usaha Nagari yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan Nagari dalam upaya mensejahterakan perekonomian desa, dibentuk berdasarkan potensi Nagari. Lembaga BUMNag adalah terobosan baru yang patut diapresiasi dalam rangka pemberdayaan dan penguatan desa. BUMNag harus diberdayakan dalam kerangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang baik dengan mengedepankan partisipasi dan prakarsa masyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menjadi obyek program, tetapi harus diperkuat kapasitasnya untuk mengawasi jalannya usaha dari BUMNag [3]. Nagari adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kesejahteraan masyarakat di Nagari dengan adanya Pembangunan pedesaan diarahkan untuk pembangunan Nagari yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan yang dimiliki (SDA dan SDM), meningkatkan keterkaitan pembangunan antar sektor (perdagangan, pertanian dan industri) antar desa, dan memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh. Pembangunan Nagari mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bisa menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar

[3] Randi Yopanggi, Muharir, and Bagus Setiawan, 'Peran Dan Pengelolaan BUMDes Anugerah Terhadap', *Qonuni*, 2.01 (2022), 37–40.

masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan.

Nagari Koto Gadang Jaya dipandang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kota baik dari segi ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Pemerintah banyak melakukan program untuk mendorong percepatan pembangunan pedesaan, tetapi hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Hal ini sejalan dengan rata pekrjaan para masyarakat Nagari Koto Gadang Jaya Kabupaten Pasaman Barat hidup dilahan pertanian dengan adanya dana desa ini maka setiap desa wajib melakukan pembangunan Nagari, terutama dalam bidang pengembangan potensi ekonomi lokal, mengingat dana yang diberikan begitu besar, maka harus dikelola dengan baik[4]. Jika dana ini bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan efektif maka akan menjadi *win solusion* bagi masyarakat.

Menurut Putri dkk[5] Salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). BUMNag merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah Nagari serta masyarakat untuk mengelola institusi

[4] Agus Salihin and others, 'Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanggik', *Al-Intaj*, 6.6 (2012), 96–104.

[5] Kiki Meisya Putri, Muhammad Arif, and Sri Ramadhani, 'Analisis Peran Pengembangan Desa Wisata Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Kaitannya Pada Pencapaian Sustainable Development Goals (Studi Kasus Desa Wisata Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang)', *JUMSI*, 2.4 (2022), 1029–37.

tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi Nagari. Pembentukan Badan Usaha Milik Nagri (BUMNag) berdasarkan pada Permendagri nomor 39 tahun 2010. Pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten/kota dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMNag. Gunawan dalam Amandin dkk[6] menjelaskan pembentukan BUMNag bertujuan untuk menerima kegiatan-kegiatan yang berkembang sesuai adat istiadat, kegiatan-kegiatan berdasarkan program Pemerintah dan seluruh kegiatan lainnya yang mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat dengan meningkatnya pendapatan masyarakat di BUMNag Koto Gadang Jaya Kabupaten Pasaman Barat akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarat. Dilihat dari berapa tahun terakhir rata-rata pendapatan masyarakat Desa Koto Gadang Jaya sebagaimana dalam tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1
Pendapatan Perhari Masyarakat Desa Koto Gadang Periode 2018-2022

Tahun	Pendapatan/hari (Rp)	Peningkatan/Penurunan (Rp)	Peningkatan/Penurunan (%)
2018	Rp95.000	Rp0	0%
2019	Rp110.000	Rp15.000	16%
2020	Rp75.000	Rp35.000	32%
2021	Rp105.000	Rp30.000	29%
2022	Rp120.000	Rp15.000	14%

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Masayarakat Desa Koto Gadang 2023

Berdasarkan tabel 1.1 Pendapatan Perhari Masyarakat Nagari Koto Gadang Periode 2018-2022 dari hasil wawancara dengan masyarakat menunjukan hasil pendapatan perhari masyarakat Nagari Koto Gadang

[6] Amandin and Yelli Aswariningsih, 'The Role Of Bumdes Towards Economic Improvement Of The Community In Prabumulih City Village', *Journal of Economic, Business and Accounting*, 6.1 (2022), 877–94.

mengalami fluaktuatif. Pada tahun 2019 pendapatan perhari masyarakat Nagari Koto Gadang sebesar Rp110.000 dengan peningkatan sebesar Rp15.000 dengan persentase kenaikan sebesar 16% dari tahun 2018. Pada tahun 2020 pendapatan perhari masyarakat Nagari Koto Gadang sebesar Rp75.000 dengan penurunan sebesar Rp35.000 dengan persentase penurunan sebesar 32% dari tahun 2019. Pada tahun 2021 pendapatan perhari masyarakat Nagari Koto Gadang sebesar Rp105.000 dengan peningkatan sebesar Rp30.000dengan persentase kenaikan sebesar 29% dari tahun 2020. Pada tahun 2022 pendapatan perhari masyarakat Nagari Koto Gadang sebesar Rp120.000 dengan peningkatan sebesar Rp15.000 dengan persentase kenaikan sebesar 14% dari tahun 2021. Berdasarkan hasil wawancara dengan para petani menyatakan pendapatan bersifat naik turun hal ini dikarenakan upaya dari para petani dalam menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran[7].

Dilihat pada tahun 2020 pendapatan perhari masayarakat mengalami penurunan sebesar 32% dari tahun sebelumnya hal ini disinyalir keadaan ekonomi dunia mengalami defisit yang diakibatkan seluruh penjuru dunia dipaksakan untuk *Lock-down* yang berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat yang membuat roda pengerak perekonomian harus staknat diposi terendah (Defisit) dalam berbagai sektor pemerintah pada saat itu difokuskan mengalokasi anggaran yang besar pada dunia bidang kesahatan yang sanggat membutuhkan anggaran yang besar.

[7] 'Wawancara Dengan Bapak Apriyadi Selaku Anggota Kelompok Tani Desa Koto Gadang', 2023.

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) atau di daerah lain lebih dikenal dengan istilahb Badan Usaha Milik Desa termasuk salah satu pilar kegiatan ekonomi yang berada pada tataran Nagari yang memiliki fungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan juga bersifat komersial (*commercial institution*)[8]. Sebagai lembaga sosial BUMNag berfungsi atas kepentingan publik/sosial melalui penyediaan layanan dan jasa publik, sedangkan BUMNag sebagai lembaga komersial memiliki arti bahwa BUMNag tersebut bertujuan untuk mencari laba melalui penawaran barang dan jasa kepasar. Sehingga disini Nagari dituntut secara mandiri untuk mampu menggali potensi dan kekayaan yang ada didaerah Nagarinya untuk dijadikan sebagai aset dan sumber pemasukan keuangan Nagari.

Namun pada saat ini dengan berkembangnya literasi keuangan syariah sehingga banyak masyarakat yang beranggapan bahwa sistem pembiyaan yang dilakukan oleh BUMNag Koto Gadang Jaya mendapatkan respon di masyarakat mengenai transaksi yang bersifat riba yang mana hal ini bertolak belakang dengan ekonomi islam karena dapat merugikan masyarakat. Hal ini berdampak pada perlambatan pendapatan masyarakat yang melaui BUMNag Koto Gadang Jaya[9]. Akan tetapi program pembangunan ekonomi dikalangan masyarakat nagari Koto Gadang Jaya melalui program yang dijalankan oleh pemerintah nagari nagari Koto Gadang Jaya yang membangun sistem keuangan yang BUMNag yang dihadirkkan berbasis koperasi yang dikenal

[8] Boni Saputra, Lince Magriasti, and Dwi Finna Syolendra, 'Penguatan Kapasitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari Bukit Gadang Mandiri Dalam Pengelolaan Sumber Kekayaan Nagari', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6.2 (2022), 547.

[9] 'Wawancara Sapudin Selaku Wali Nagari Koto Gadang Jaya', 2023.

dengan Gapoktan Albasiko yang berupaya hadir di tengah masyarakat untuk menjadi solusi bagi masyarakat nagari Koto Gadang Jaya seperti pengadaan pembiayaan dengan menyalurkan pembiyaan seperti konsumsi rumah tangga ataupun kebutuhan pertanian yang ada dimasyarakat nagari Koto Gadang Jaya[10].

Sebenarnya beberapa upaya telah dilakukan pemerintah Nagari Koto Gadang Jaya untuk mengatasi masalah tersebut diatas, salah satunya yaitu dengan melakukan pelatihan tentang pengelolaan BUMNAg untuk dapat dijadikan sebagai wadah atau instrumen dalam meningkat kesejahteraan masyarakat dengan menghadirkan sistem pembiayaan agar dapat mendorong peningkatan sumber daya masyarakat dalam menguatkan pondasi ekonomi demi tercpainya tujuan yakni kesejahteraan bagi masyarakat Nagari Koto Gadang Jaya lewat program yang dihadirkan dalam BUMNAg yang dikelola secara mandiri oleh Nagari.

Berdasarkan paparan diatas merujuk dari beberapa riset terdahulu maka peneliti tertaik untuk membahas lebh lanjut permaslahan (BUMNag) Di Desa Koto Gadang Jaya Kabupaten Pasaman Barat dengan dengan judul penelitian "**Analisis Peran Badan Usaha Milik Nagari Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Koto Gadang Jaya Kabupaten Pasaman Barat"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka masalah dalam penelitian ini teridentifikasi sebagai berikut:

[10] 'Wawancara Sapudin Selaku Wali Nagari Koto Gadang Jaya'.

1. Tingkat pendapatan masayarakat periode 2018-2022 mengalami fluaktuatif
2. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia belum efektif
3. Anggaran Nagari belum teralokasi dengan baik untuk pembangunan BUMNag
4. BUMNag belum mampu memfasilitas masayarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka penelitian dibatasi pada peran pemerintah nagari Koto Gadang Jaya dalam meingkatkan kesejahteraan masyarakat nagari Koto Gadang Jaya dalam perspektif ekonomi islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran BUMNag Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Koto Gadang Jaya Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa Kendala BUMNag dalam meningkatkan kesejateraan masyarakat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran BUMNag dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Koto Gadang Jaya Kabupaten Pasaman Barat
2. Untuk mengetahui Kendala BUMNag dalam meningkatkan kesejateraan masyarakat

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka penelitian diaharpkan untuk memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Penulis

   Sebagai salah satu syarat penyelesaian studi Srata Satu S1 pada program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi angkatan tahun 2018. Dan sebagai salah satu sumbangsih dari hasil pemikiran dari penulis mengenai Peran Dan Kontribusi Badan Usaha Milik Nagari dalam perspektif ekonomi islam.

2. Manfaat Akademis

   Dapat diajadikan sebegai referensi atau rujukan dan memperkaya penelitian selanjutnya baik dari teoritis mapun temuan dalam pembahsan Badan Usaha Milik Nagari yang dielaborasi dengan tinjau fikih muamalah dalam ekonomi islam.

3. Manfaat Praktis

   Sebegai sumber informasi dan rujukan dalam melakukan pembangunan BUMNag dan juga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam mengelola kegiatan badan usaha milik desa BUMNag dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan. Sebagai sumber rujukan bagi pratiksi dalam mengelola BUMNag berdasarkan landasan ekonomi Islam.

G. Penjelas Judul

Sebelum menguraikan proposal skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul dengan maksut untuk menghindari kesalah pahaman pengertian. Skripsi ini berjudul "**Analisis Peran Badan Usaha Milik Nagari Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Koto Gadang Jaya Kabupaten Pasaman Barat"** sebagaiaman penjelasam dibawah ini:

Peran BUMNag : Istilah peran dalam KBI adalah suatu aspek dinamis yang dimiliki oleh seseorang dalam ititusi tertentu atau yang sering dikenal dengan istilah pejabat. Badan Usaha Miliki Nagari yang artinya sebuah usaha yang didirikan oleh lembaga Pemerintah Nagari dalam menyelesaikan masalah perekonomian masyarakat.

Kesejahteraan Masyarakat: Kesejahteraan masyarakat yang dikenal dengan masyarakat yang memiliki aspek kecakapan dalam pendapatan, pendidikan, kesehatan, konsumsi dan lain-lainya.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Badan Usaha Miliki Nagari

1. Pengertian BUMNag

BUMNag adalah pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMNag sebagai lembaga sosial itu berfokus pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya pada penyediaan pelayanan sosial. BUMNag sebagai lembaga komersialitu bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. Prinsip efisiensi dan efektivitas harus ditekankan saat menjalankan usaha[11].

BUMNag sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan tata perundangundangan yang berlaku sesuai kesepakatan yang terbangun di masyarakat nagari Dengan demikian, bentuk BUMNag dapat beragam di setiap nagari di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa. Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah, BUMNag bertujuan meningkatkan pendapatan asli desa, setiap pemerintah desa dapat mendirikan BUMNag. BUMNag didirikan menurut prakarsa masyarakat sesuai potensi yang dapat dikembangkan menggunakan sumber daya lokal dan permintaan pasar. Pendirian BUMNag itu bukannya paket instruksional dari

[11] Ikhwan Abidin Basri, Islam Dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat (Jakarta: Gema Insani Pers, 2009) hal 96.

pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Kalau demikian, maka dikhawatirkan BUMNag akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-undang tersebut.

Tugas peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi atau pemerintah kabuparen tentang arti penting BUMNag bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah nagari, masyarakat dimotivasi, dan dipersiapkan untuk membangun hidupnya. Pemerintah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancarkan pendirian BUMNag. Operasionalisasi diserahkan pada masyarakat desa. Masyarakat desa perlu dipersiapkan agar dapat menerima gagasan baru mengenai lembaga ekonomi yang memiliki fungsi sosial dan fungsi komersial tersebut. Persiapan yang dipandang paling tepat berfokus pada sosialisasi, pendidikan, serta pelatihan kepada pemangku kepentingan untuk peningkatan standar hidup masyarakat desa pemerintah desa, BPD, ketua suku, dan ketua kelembagaan di perdesaan.

Menurut undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pembangunan desa bertujuan agar meningkatkan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan mengedepankan kebersamaan,

kekeluargaan, gotong royongan guna mewujudkan pengarus utamaan perdamaian dan keadilan sosial12.

BUMNag bisa menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum dan dalam kegiatannya tidak haya berorientasi pada keuntungan keuangan tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari. BUMNag nagari dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. BUMNag dapat menghimpun tabungan di dalam skala lakol masyarakat nagari, antara lain melalui pengeloaan dana bergulir dan simpan pinjam. Dalam konteks demikian, pendirian BUMNag pun diposisikan menjadi kebijakan mewujudkan Nawacita pertama, ketiga, kelima, dan ketujuh dangan makna berikut13:

1) BUMNag merupakan salah satu strategi kebijakan menghadirkan institusi negara kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa yang disebut tradisi berdesa
2) BUMNag juga merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif
3) BUMNag juga merupakan salah satu strategi kebijakan meningkatkan mutu hidup manusia Indonesia di desa

[12] David Wijaya, BUM DESA Badan Usaha Milik Desa (Yogyakarta: Gava Media, 2018) hal 93.

[13] Basri, *Islam Dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat*.

4) BUMNag merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Nagari yang mampu menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa.

2. Peran BUMNag Terhadap Meningkatan Perekonomian Masyarakat

Menurut abidin terdapat beberapa peranan BUMNag adalah sebagai berikut[14]:

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat nagari, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMNag sebagai pondasinya.

3. Prinsip Pengelolaan BUMNag

Prinsip pengelolaan BUMnag penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar bisa dipahami serta dipersepsikan dengan cara serupa oleh pemerintah nagari, anggota atau penyerta modal, BPD, pemerintah kabupaten, serta masyarakat. Terdapat enam prinsip dalam mengelola BUMnag, antara lain meliputi.

[14] Basri, *Islam Dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat*.

1) Kooperatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMnag harus melaksanakan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya
2) Partisipatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMnag pun bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang bisa mendorong kemajuan usaha BUMnag.
3) Emansipatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMnag harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama
4) Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka
5) Akuntabel, keseluruhan kegiatan usaha BUMnag harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun secara administratif.
6) Berkelanjutan, seluruh kegiatan usaha BUMnag harus dapat dikembangkan serta dilestarikan oleh masyarakat Desa dalam wadah BUMnag
7) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat nagari
8) Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat

4. Pendirian BUMnag

Pendirian BUMnag adalah salah satu pilihan nagari pada gerakan usaha ekonomi Desa, pasal 87 ayat 1 undang-undang desa; pasal 132 ayat 1 peraturan pemerintahan Nagari; dan pasal 4 peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMnag. Frasa dapat mendirikan BUMnag dalam peraturan perundang-undangan desa berarti pengakuan dan penghormatan prakarsa desa pada gerakan usaha ekonomi.

Interpretasi sistem hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang desa menghasilkan peta jalan pendirian BUMnag. Pendirian BUMnag didasarkan prakarsa desa yang mempertimbangkan:

1) Inisiatif pemerintah desa dan masyarakat nagari
2) Potensi usaha ekonomi nagari
3) Sumber daya alam di nagari
4) Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMnag.
5) Penyertaan modal dari pemerintah desa di dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMNag.

Salah satu basis pengembangan ekonomi desa yang diharapkan bisa berkembang dengan memanfaatkan potensi lokal ialah kelembagaan BUMnag. BUMnag ke depan diharapkan dapat menjadi

penggerak ekonomi lokal di perdesaan. Bahkan, di beberapa desa di beberapa daerah, BUMnag tidak haya menjadi penggerak ekonomi tapi juga dapat berperan sebagai instrumen sosial, menumbuhkan kembali nilai-nilai sosial lokal, melawan munculnya pragmatisme, memunculkan keberpihakan dan kepedulian sosial terhadap kelompok marginal, serta mendorong kehidupan egalitarian di masyarakat.

Pelembagaan BUMnag diharapkan tidak mempengaruhi upaya Desa membentuk lembaga perekonomian perdesaan. Saat ini, yang paling penting adalah mengupayakan tumbuhnya usaha Desa yang mampu memberikan manfaaat bagi warga Desa baik secara langsung dan tidak langsung. Pelembagaan BUMnag dapat melekat dalam pandangan dan aktivitas warga masyarakat sehingga pada akhirnya BUMnag s serta unit-unit usaha yang diselenggarakannnya dapat menjadi bagian dari kegiatan seharihari masyarakat

5. Manfaat dan Tujuan Kajian Kelayakan Penentuan Unit Usaha BUMnag

[15]Pada dasarnya, kajian kelayakan usaha bisa dilaksanakan untuk mendirikan usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Kajian kelayakan usaha tidak haya diperlukan di awal pendirian tetapi juga dilakukan ketika BUMnag hendak melakukan pengembangan usaha BUMnag. Kajian kelayakan penentuan unit usaha BUMnag yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan

[15] Basri, *Islam Dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat*.

menggunakan cara yang tepat akan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Terpilihnya jenis usaha yang mampu menghasilkan kemanfaatan paling besar atau paling layak untuk dilaksanakan.
b. Dapat memperkecil risiko kegagalan usaha atau mencegah kerugian.
c. Tersedianya data dan informasi tentang kelayakan usaha akan memudahkan dalam menyusun perencanaan usaha.
d. Meningkatnya kemampuan atau keterampilan warga desa dalam mengelola usaha ekonomi secara rasional dan modern.
e. Tersedianya informasi tentang prospek usaha yang dapat menarik warga desa dan pihak lainnya untuk mendukung pengembangan usaha, misalnya warga desa atau lembaga keuangan bank itu tertarik menanamkan modal atau meminjamkan uang untuk mendukung pengembangan usaha yang dilakukan BUMnag.

Tujuan dilakukannya kajian kelayakan penentuan unit usaha BUMnag mencakup antara lain sebagai berikut.

1) Memperhitungkan keadaan internal desa (potensi desa dan kebutuhan masyarakat) dan eksternal desa (peluang dan ancaman pengembangan usaha) sebagai acuan di dalam perencanaan usaha ekonomi desa.
2) Memantapkan gagasan usaha ekonomi.

3) Merencanakan sumber daya manusia (SDM), terutama agar mampu mempersiapkan orang-orang yang berkualitas sebagai pengelola unit usaha.
4) Merancang organisasi unit usaha.
5) Memperhitungkan peluang dan risiko usaha.
6) Menentukan jenis usaha yang memungkinkan dan menguntungkan dijalankan.

E. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan menurut UUD 1945: Kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekolompok orang, laki-laki dan perempuan mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Dalam bahas Arab sendiri masyarakat disebut dengan mujtama' yang menurut Ibn Manzur dalam Lisan al'Arab mengandung arti pokok dari segala sesuatu, yakni tempat tumbuhnya keturunan. Sedangkan musyarakah mengandung arti berserikat, bersekutu dan saling bekerjasama. Jadi dari kata musyarakah dan mujtama' sudah dapat ditarik pengertian bahwa masyarakat adalah kumpulan dari orang banyak yang berbeda-beda tetapi menyatu dalam ikatan kerjasama, dan mematuhi peraturan yang disepakati bersama[16]. Berarti dengan kata lain kesejahteraan masyarakat itu sendiri adalah upaya yang dilakukan seorang

[16] Achmad Mubarok, *Psikologi Keluarga* (Malang: Madani, 2016) hal 207-208.

individu ataupunn lembaga dalam memberikan suatu kontribusi dari segi materi ataupun tindakan, guna dengan kegiatan tersebut bisa mengarahkan masyarakat menjadi lebih kecukupan dalam pemenuhan kehidupanya serta memberikan keamanan.

Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, "Kesejahteran adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga melaksanakan fungsi sosialnya". Kesejahteraan dapat dilihat dari pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Pemerataan pendapatan berhubungan dengan adanya lapangan pekerjaan, peluang dan kondisi usaha dan faktor ekonomi lainya. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang diterima[17]

2. Terwujundnya Masyarakat Sejahtera

Terwujudnya kesejahteraan warga negara dapat menciptakan struktur masyarakat atau negara yang seimbang dan teratur dengan memberi kesempatan kepada semua warga Negara untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Karena pemerintah sebagai pimpinan Negara mempunyai tugas utama yang mana untuk memajukan kesejahteraan umum. Tidak

[17] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat,* (Bandung: PT Refika Pertama, 2015) hal 86.

hanya kesejahteraan lahir tetapi juga kesejahteraan batin. Oleh karena begitu luas jangkauan kesejahteraan yang meliputi lahir dan batin ini, kesejahteraan umum berarti diakui dan dihormatinya hak-hak dasar warga negara dan tersedianya barang dan jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli rakyat. Dalam rangka mewujudkan hal ini negara harus melakukan beberapa hal yakni dianataranya adalah:

1) Wajib menetapkan dan menegakkan hak-hak asasi
2) Wajib mengusahakan agar barang dan jasa keperluan hidup dihasilkan dan atau didatangkan mencukupi keperluan hidup warga Negara dan dapat didistribusikan dengan cepat, aman dan dijual dengan harga yang wajar seimbang dengan daya beli warga Negara.
3) Harus mengusahakan setiap warga Negara mampu bekerja secara produktif dengan syarat-syarat kerja yang wajar dan gaji yangmencukupi kebutuhan hidup dan keluarganya. Wajib memberikan bantuan seperlunya kepada mereka yang terganggu secara fisik dan mentalnya[18].

3. Indikator Kesejahteraan

Indikator kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat yakni sebagai berikut:

1) Pendapatan

[18] Soedjono Dirdjosiswor, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindopersada, 2003) hal 98.

Pendapatan atau penghasilan adalah indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh sesorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu tahun). Pendapatan terdiri dari tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga dan deviden) serta tunjangan dari pemerintah[19]

2) Perumahan dan pemukiman

Perumahan dan pemukiman selain menjadi kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sngat strategis dalam pernananya sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Selai itu, rumah juga merupakan determinan kesehatan masyarakat, dimana rumah yang sehat dan nyaman adalah rumah yang mamu menunjang kondisi kesehatan tiap penguninya

3) Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya, sehingga pemabngunan dan berbagai upaya dibidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaanya. Kesehatan menjadi indikator kesejahteraan yang dapat dilihat melalui mampu atau

[19] Dumairy, Syamsul Hadi, and Muhammad, 'Model Perhitungan Pendapatan Nasional Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal CMES*, XI.2 (2018), 174–86.

tidaknya masyarakat serta mampu untuk membiayai secara penuh obat yang dibutuhkan.

4) Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, sku, etnis, agama dan lokasi geografis. Berdasarkan indikator-indikator kesejahteraan dikemukakan diatas maka proses pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan yang mendukung pembangunan manusia yang lebih berkualitas[20].

4. Kesejateraan Menurut Ekonomi Islam

Islam mengatur sedemikian rupa akan masalah ekonomi umatnya, khususnya dalam hal kemiskinan. Banyak faktor yang menjadi penyebab kemiskinan, di antaranya karena ketidakpedulian orang-orang kaya yang mana menyebabkan orang-orang miskin semakin terjerat pada lingkaran kemiskinannya. Merespon tentang kondisi tersebut, Islam memberlakukan kewajiban kepada umatnya untuk membayar zakat sesuai ketentuan yang berlaku, dan anjuran berinfak dan bershadaqah sesuai kemampuannya

Dalam ajaran Islam terdapat dua prinsip utama dalam kegiatan ekonomi yakni, Pertama: Islam melarang satu pihak mengeksploitasi pihak lain dengan alasan apa pun, Kedua: Islam melarang satu pihak

[20] Ikhwan Abidin Basri, *Islam Dan Pembangunan Ekonomi Masyrakat* (Jakarta: Gema Insani Press, 2009) hal 96.

membedakan, membatasi, dan memisahkan dengan pihak lainnya[21]. Islam memandang bahwa umat manusia bagaikan satu keluarga, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah An-Nur.

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمۡ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرۡتَضَىٰ لَهُمۡ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعۡدِ خَوۡفِهِمۡ أَمۡنٗاۚ يَعۡبُدُونَنِي لَا يُشۡرِكُونَ بِي شَيۡـٔٗاۚ وَمَن كَفَرَ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ

Artimya: *"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.*(Q.S. An-Nur 55)

Sebagaimana ayat diatas menjelaskan manusia tidak dibenarkan berkuasa dalam kegiatan ekonomi secara sendiri harus bersifat merata mampu mendistribusikan pendapatan demi terwjudnya falah dalam ekonomi islam. sebab itu, setiap manusia memiliki hak, kewajiban dan derajat yang sama dalam lingkup sosial ekonomi, yang membedakan hanyalah tingkat keimanan dan ketwaaanya kepada Allah SWT. Begitu pun dalam pandangan hukum, setiap masyarakat ekonomi memiliki hak dan perlakuan yang sama dalam setiap kegiatan ekonomi, selama hak itu tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada.

[21] Eka Sri Apriliana, 'Upaya Peningkatan Pendapatan Nasional Di Tengah Wabah Virus Corona Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 6.1 (2020), 19–28.

Terciptanya kesejahteraan ekonomi rakyat merupakan tujuan utama berdirinya negara Republik Indonesia. Kesejahteraan dalam sistem ekonomi kapitalis hanya mengedepankan kebutuhan materi yang bersifat lahiriah, Konsep kesejahteraan menurut Islam lebih dari itu. Tulisan ini berangkat dari fenomena kegagalan sistem ekonomi kapitalis, dan memberikan alternatif sistem ekonomi Islam sebagai pemecahan masalah dari ketimpangan dan ketidakmerataan distribusi kekayaan yang menyebabkan radius kemiskinan[22] semakin meningkat dan meluas dan adil sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah.

وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَآ أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَٰقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *"Dan demikianlah Tuhanmu, memilih kamu (untuk menjadi Nabi) dan diajarkan-Nya kepadamu sebahagian dari ta'bir mimpi-mimpi dan disempurnakan-Nya nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Ya'qub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, (yaitu) Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*.(Q.S. Yusuf :6)

Sebagaimana ayat diatas menjelsaka kesejahteraan dalam ekonomi islam harus bersifat pemerataan demi terwujudnya kesejahteraan dengan bersifat keadilan yang tidak boleh menindas satu sama lain sebagaimana firman Allah SWT pada al-Qur'an surah An-Nisa.

[22] Yusuf Qardawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema insani Press, 1997)hal 342.

۞يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُواْ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan*.(Q.S. An-Nisa : 135)

F. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat[23]. Demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula. pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsikan, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras

[23] Soekartawi, Faktor-Faktor Produksi (Jakarta: Salemba Empat, 2012) hal 132.

yang dikonsumsikan adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik. Sedangkan menurut Boediono pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi[24]:

a. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada, hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
b. Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.
c. Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.

Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya.

2. Landasan Syariah Mengenai Pendapatan

Pendapatan diartikan sebagai suatu aliran uang atau daya beli yang dihasilkan dari penggunaan sumber daya properti manusia. Menurut Winardi , pendapatan (*income*), secara teori ekonomi adalah

[24] Boediono, Pengantar Ekonomi (Jakarta: Erlangga, 2022) hal 150.

hasil berupa uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia bebas. Dalam pengertian pembukuan pendapatan diartikan sebagai pendapatan sebuah perusahaan atau individu. Sloan dan Zurcher mengartikan kekayaan sebagai obyek-obyek material, yang ekstern bagi manusia yang bersifat: berguna, dapat dicapai dan langka[25]. Kebanyakan ahli ekonomi tidak menggolongkan dalam istilah kekayaan hak milik atas harta kekayaan, misalnya saham, obligasi, surat hipotik karena dokumen-dokumen tersebut dianggap sebagai bukti hak milik atas kekayaan, jadi bukan kekayaan itu sendiri.

Adapun prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan. Dengan demikian, kekayaan yang ada dapat melimpah scara merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja[26]. Sementara menurut Anas Zarqa mengatakan bahwa distribusi adalah transfer pendapatan kekayaan antar individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara yang lain, seperti warisan, shadaqah, waqaf, dan zakat. Sebagaiamana masalah pendapatan yang tertera pada al-Qur'an surah Ar-rum 39.

[25] Ali Topan Lubis, 'Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Islam', JIBF MADINA, 1.1 (2020), 53–67.
[26] Apriliana.

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ

Artinya: "*Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*(Q.S.Ar-rum : 39)

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwadalam ekonomi islam pendapatan tidak dibenarkan berda satu tumpukan atau hany individu saya yang memiliki kekeayaan melainkan mendistribusikan pendapatansecara merata demi mewujudkan kebangkitan ekonomi dalam mencipatkan kemaslahatan umat seperti memperbanyak zakat, infak dan sedekah kepada sesama manusia lain ataupun bantuan berupa meteri kepada yang layak menerimanya[27].

Anjuran ini berlaku bagi setiap muslim, tanpa memandang tingkat kemampuan ekonomi. Bahkan tidak memandang situasi sesaat apakah sedang lapang rezeki atau sedang sempit rezeki. Anjuran tanpa syarat ini, dan secara hukum berkedudukan sunnah, mengisyaratkan betapa ummat Islam senantiasa harus memiliki kepedulian terhadap orang lain, harus sedapat mungkin menolong orang lain, sebab sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan demikian, setiap muslim semestinya memiliki kepedulian sosial! Setiap muslim seharusnya terlekati sifat kedermawanan, selalu tergerak untuk menolong orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2.

[27] Dumairy, Hadi, and Muhammad.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ
وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ
وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن
صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ
وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu rang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

Sebagaimana ayat diatas menjelaskan bahwa Syi'ar Allah Ialah: segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadat haji dan tempat-tempat mengerjakannya. Maksudnya antara lain Ialah: bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab), tanah Haram (Mekah) dan Ihram., Maksudnya Ialah: dilarang melakukan peperangan di bulan-bulan itu.Ialah: binatang (unta, lembu, kambing, biri-biri) yang dibawa ke ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih ditanah Haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadat haji. binatang had-ya yang diberi kalung, supaya diketahui orang bahwa binatang itu telah diperuntukkan untuk dibawa ke Ka'bah. Dimaksud dengan karunia Ialah: Keuntungan yang diberikan Allah dalam perniagaan.

keredhaan dari Allah Ialah: pahala amalan haji. Dari penjelasan tafsir ayat ini suatu kewajiban bagi kita sesama muslim dlam saling tolong menolong.

G. Kajian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis bukanlah yang pertama yang membahas tentang Analisis Peran Dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Koto Gadang Jaya Kabupaten Pasaman Barat". Adapun beberapa karya tulis ilmiah yang dapat penulis pakai sebagai rujukan untuk mendukung dalam penulisan proposal skripsi, antara lain:

Tabel 2.1
Kajian Terdahulu

No	Penulis/Tahun	Judul	Temuan
1	Pradnyani (2019)[28]	Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara	Peranan BUMDES Gentha Persada dalam mensejahterakan masyarakat telah diwujudkan dengan adanya unit-unit usaha yang ada didalamnya seperti unit usaha simpan pinjam, jasa sampah, money charger, dan perdagangan. BUMDes juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa Tibubeneng sehingga mengurangi pengangguran.
2	Yulian (2022)[29]	Peran (BUMDes) "Maju Bersama" Dalam Pengembangan Ekonomi di Desa Tunjungtirto,	Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa BUMDes "Maju Bersama" mampu mengembangkan

[28] Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani, 'Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara', *Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani*, 9.2 (2019), 39–47.

[29] Dewi Inayah Ratna Yulian, 'Peran (BUMDes) "Maju Bersama" Dalam Pengembangan Ekonomi Di Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2.1 (2022), 114–25.

		Kecamatan Singosari	perekonomian masyarakat dalam mengembangkan usaha melalui beberapa unit yang didirkan BUMDes, dalam upaya mengurangi pengangguran, BUMDes "Maju Bersama" telah menyerap tenaga kerja dari Desa Tunjungtirto dan menggerakan masyarakat desa agar lebih produktif meskipun masih dalam skala kecil, dan BUMDes "Maju Bersama" cukup mengembangkan ekonomi desa dan didukung penuh oleh masyarakat Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang
3	Dima (2022)[30]	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa Kuanheun Kabupaten Kupang Barat	peran BUMDes dalam mendukung kemandirian ekonomi desa yaitu peran BUMDes dalam hal pelayanan mempengaruhi kemandirian ekonomi desa, dan peran BUMDes dalam hal akuntabilitas memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan awal masyarakat. Desa Dampak, peran BUMDes dalam meningkatkan taraf hidup, telah mempengaruhi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan
4	Suparwi dkk (2022)	Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Desa Kadirejo Pabelan Kabupaten Semarang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes Jaya Mandiri berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa melalui keberadaan kios-kios BUMDes dan unitunit usaha meliputi perdagangan, jasa pelayanan,

[30] Dima.

			persewaan aset desa, dan pertanian. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan BUMDes adalah meningkatnya pendapatan asli desa, terciptanya fasilitas perekonomian bagi masyarakat, terwujudnya desa mandiri internet, dan pemanfataan aset-aset desa.
5	Leunupun & ktawlora (2022)[31]	Peran Bumdes Dalam Membangun Kewirausahaan Dan Kemandirian Desa (Studi Kasus Pada Desa Tomra)	Hasil penelitian menunjukan bahwa program Bumdes desa Tomra yang dikelola untuk membangun kewirausahaan dan kemandirian di desa Tomra adalah unit usaha air galon dan usaha mobil bis. Unit usaha ini telah didirikan sejak 15 Juni 2018 yang dikelola bersama oleh mayarakat dan pemerintah desa. Keberhasilan BUMDes desa Tomra sangat membantu perekonomian desa dalam hal penyediaan air isi ulang untuk menunjang ketersediaan air bersih bagi masyarakat dan mobil bis untuk memudahkan masyarakat bepergian
6	Amandin & Aswariningsih (2022)[32]	Peran Bumdes Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Desa Kota Prabumulih	Hasil analisis menunjukkan bahwa peran bumdes di Kota Prabumulih sudah berjalan, seperti menjalankan sebuah usaha perkrediatan mikro, menjalankan jasa persewaan, menjalankan agribisnis pertenakan sapi dan dari keseluruhan tersebut dapat meningkatkan perekonomian desa, hanya kinerja dari bumdes tersebut belum

[31] Engrith Grafelia Leunupun and Dolveci Aktawlora, 'Peran Bumdes Dalam Membangun Kewirausahaan Dan Kemandirian Desa (Studi Kasus Pada Desa Tomra)', *Kupna Jurnal*, 3.1 (2022), 57–70.

[32] Amandin and Aswariningsih.

			maksimal yaitu pengembangan usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli kota sesuai yang diharapkan
7	Zamhasari, Dkk (2023)	Dominasi Peran Wali Nagari Dalam Pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAGARI)	hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Wali Nagari memiliki peran yang sangat dominan dalam pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNagari) di Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota. Dominasi peran Wali Nagari tersebut dapat dilihat dengan tingginya pengarahan dalam pendirian, penentuan jenis usaha BUMNag, dan besarnya penyertaan modal ke BUMNag. Tahapan-tahapan
8	Mubarak, dkk (2022)	Penguatan Badan Usaha Milik Nagari Melalui Pelatihan Penyusunan Business Model Canvas	Hasilnya adalah meningkatnya pengetahuan pengelola BUMNag terhadap model bisnis, meningkatnya keahlian pengelola dalam membuat model bisnis kanvas serta meningkatnya motivasi pengelola dalam mengelola BUMNag secara professional

9	Das, dkk (2022)	Menggali Potensi Nagari Untuk Penguatan BUMNag 12 Suku Di Nagari Salimpauang	BUMNag dan aparatur nagari terhadap penguatan kelembagaan BUMNag. Nagari Koto Laweh sudah memiliki BUMNag yang bernama "BUMNag Puro Nagari" dan sudah berjalan, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah Kurangnya pemahaman pengurus akan peran pentingnya BUMNag bagi Nagari dan kesibukan pengurus dipekerjaan lain yang membuat kegiatan operasional BUMNag hampir mati tota

Perbedaan penelitiaini dengan penelitian terdahulu dilihat dari beberapa studi terdahulu menemukan beberapa perbedaan dianataranya dilihat dari tinjauan secara teoritis bahwa penelitian ini lebih dominan ke konsep ekonomi islam dalam mengimlementasikan peran BUMNag untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan serta kemaslahatan yang dapat dicapai oleh BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deksriptif kualitatif. Penelitian ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Menurut Sugiyono[33] penelitian deskriptif adalah suat metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deksriptif kualitatif adalah untuk membuat dekriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual akurat mengenai fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidikit.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Di Desa Koto Gadang Jaya Kabupaten Pasaman Barat" Waktu penelitian dimulai dari Bulan Januari 2023 sampai selesai

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penulisan ini, sumber data yang digunakan adalah:

1. Data Primer

   Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari anggota kelompok masyarakat Nagari Koto Gadang Jaya..

2. Data Sekunder

[33] Sugiyono, *Sugiyono, Menyusun Skripsi, Tesis, Dan Disertasi* (Bandung: Cv. Alfabeta, 2015) hal 345.

Data tambahan atau pendukung yang tidak diperoleh dari sumber utama. Adapun sumber data skunder penelitian ini sebagai berikut:

3. Studi Pustaka

Selain observasi dan wawancara, data yang diperoleh dengan melalukan studi pustaka. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian maka peneliti perlu membaca buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya.

4. Internet Research

Internet research digunakan untuk melengkapai data yang diperoleh dari studi pustaka. Perkembangan nformasi yang sangat cepat di internet, sehingga data yang *up to date* membantu penulis memenuhi tujuan penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seluruh anggota atau jajaran Pengelola BUMdes Koto Gadang Jaya
2. Tokoh masyarakat Koto Gadang Jaya yang terlibat di operasional BUMdes.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada Seluruh anggota atau jajaran Pengelola BUMdes Koto Gadang Jaya Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan, dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian.

Wawancara mengharuskan kedua belah pihak baik itu peneliti maupun subjek kajian bertemu dan berinteraksi langsung dan aktif agar dapat mencapai tujuan data yang didapat baik dan akurat[34].

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah arsip dari lembaga pemerintahan di Desa Koto Gadang Jaya Kabupaten Pasaman Barat yang berisi data statistik kewilayahan, data kependudukan yang meliputi data kesejahteraan/perekonomian masyarakat di Nagari Air Bangis.

F. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data berdasarkan pendapat Sugiyono[35], dengan melalui model Miles dan Huberman. Maka, langkah-langkah analisis berikut:

1. Reduction data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari kejelasan makna jawaban, kesesuaian antara pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lain, relevansi jawaban dan keseragaman kesatuan data berdasarkan substansi maksudnya kemudian digolongkan ke dalam bagian-bagian pokok atau sub pokok penelitian
2. Display data, yaitu penyajian data, penyajian data dilakukan melalui bentuk uraian singkat, dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti

[34] Sugyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Cv. Alfabeta, 2017) hal 87.

[35] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013) hal 404.

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku dan selanjutnya dapat disajikan

3. *Conclusion drawing*/verifikasi data, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Profil BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya

1. Sejarah berdiri BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya

Pendirian BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya mengacu pada Undang – Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa yang berbunyi :

a) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa
b) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong
c) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

Pendirian BUMNag kemudian di kokohkan dengan dibentuknya Peraturan No 6 Tahun 2018 Tentang BUMNag, selanjutnya BUMNag di Nagari Cupak dibentuk melalui musyawarah nagari dengan dihadiri tokoh – tokoh masyarakat hingga membentuk suatu kesepakatan untuk membangun BUMNag yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, maka berdirilah BUMNag di Nagari Cupak Pada tanggal 28 Desember 2018, yang pada saat itu unit usaha yang diusulkan ada 3, yaitu : pengelolaan objek wisata, pengadaan sarana dan prasarana pertanian, serta pemasaran produk – produk pertanian dan perikanan.

Modal awal BUMNag Usali Nagari Cupak berdasarkan pada Pasal 20 Peraturan Nagari Cupak Nomor 6 Tahun 2019, yaitu :

1) Modal awal BUMNag bersumber dari APBN Nagari sebesar Rp 100.000.000 pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 diberikan lagi dana perimbangan sebesar Rp 20.000.000
2) Modal BUMNag terdiri dari : penyertaan modal nagari, penyertaan modal masyarakat, serta penyertaan modal pihak ketiga lainnya

2. Visi Dan Misi BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya

a. Visi BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya

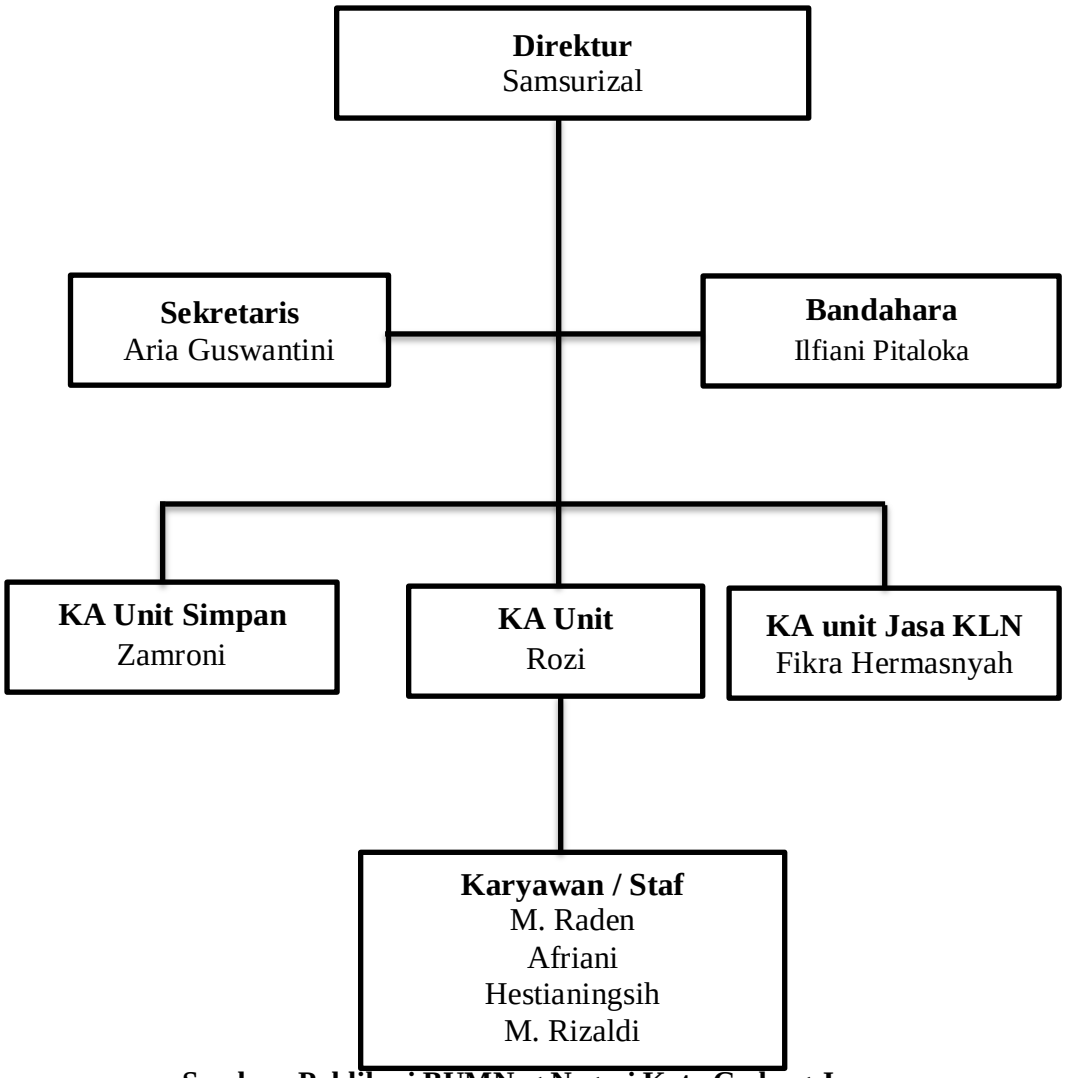
Terwujudnya masyarakat Nagari Koto Gadang Jaya yang Bersih, Relegius, Sejahtera, Rapi dan Indah melalui Akselerasi Pembangunan yang berbasis Keagamaan, Budaya Hukum dan Berwawasan Lingkungan dengan berorentasi pada peningkatan Kinerja Aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat"

b. Misi BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya

- Pembangunan Jangka Panjang
- Melanjutkan pembangunan perekonomian nagari yang belum terlaksana.
- Meningkatkan kerjasama antara pemerintah nagari dengan lembaga-lemabaga negeri yang ada.
- Meningkatkan kesejahtraan masyarakat nagari dengan meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga.

3. Struktur Organisasi BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya



Sumber: Publikasi BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Peran BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya

Dalam UU dijelaskan bahwa Bumnag menjalankan usaha di bidang ekonomi dan pelayanan umum. Hasil usaha digunakan untuk pengembangan usaha dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu beberapa peran yang harus dilakukan oleh pengelola BUMNag Koto Kadang Jaya**.** Strategi untuk melakukan pembangunan dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat nagari Koto Gadang Jaya.

"Menurut Bapak Samsurizal selaku direktur BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan strategi yang diterapakan pada BUMNag Koto Gadang Jaya menyesuaikan dengan tingkat kondisi ekonomi yang dilihat dari lingkungan maka BUMNag akan menyiapkan berbagai macam tawaran produk pembiayaan maupun kerja sama dengan masyarakat dalam mendukung aktivitas pertanian di nagari Koto Gadang Jaya".

"Menurut Bapak Jefri selaku anggota BUMNag strategi yang dirancang dalam menjalankan oprasional BUMNag seringkali dilakukan sesuai dengan permasaslahan yang dialami masyarakat sehingga bisa lebih efektif dalam mendukung sumber daya masyarakat dalam menghasilkan nilai ekonomi".

"Menurut Bapak Raden selaku anggota BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan strategi akan dirancang selama 6 bulan sekali bisa beruba-berubah strategi yang diterapkan hal ini disinyalir kondisi ekonomi yang bersifat fluaktuatif"

"Menurut Bapak Rozi selaku anggota BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan bahwa strategi pada BUMNag bisa diterapkan ketika para pemangku kebijakan mengetahui masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat sehingga strategi yang dirancang bisa menjadi sebuah solusi".

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang dibangun oleh pihak BUMNag agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yakni harus mengacu pada masalah utama yang terjadi pada lingkungan masyarakat nagari Koto

Gadang Jaya agar bisa lebih tepat dalam hal mengambil keputusan dalam menetapkan sebuah strategi maka dari para masyarakat juga ditekankan agar bisa bekerja sama dalam mendukung program yang ditawarkan oleh pemerintah nagari dalam mendukung ekonomi masyarakat agar sesuai dengan yang diharapkan yakni kesejahteraan.

Peran secara aktif BUMNag dalam upaya meningkatan kualitas kehidupan masyarakat nagari Koto Gadang Jaya.

"Menurut Bapak Samsurizal selaku direktur BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan bahwa peran BUMNag adalah lembaga usaha nagari yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah nagari dalam upaya memperkuat perekonomian nagari dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi nagari".

"Menurut Bapak Jefri selaku anggota BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan bahwa peran BUMNag Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat"

"Menurut Bapak Raden selaku anggota BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan bahwa peran BUMNag sebagai lembaga pengungkit perekonomian desa melalui peningkatan layanan umum dan mengoptimalkan asset nagari".

"Menurut Bapak Rozi selaku anggota BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan bahwa peran BUMNag meningkatkan perekonomian nagari meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan di Nagari".

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Peran BUMNag secara aktif dinagari Koto Gadang Jaya adalah lembaga usaha yang dibentuk oleh pemerintah nagari dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai nilai ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari Koto Gadang Jaya.

Cara memperkokoh pondasi perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dengan memanfaatkan BUMNag.

"Menurut Bapak Samsurizal selaku direktur BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan bahwa untuk memperkokoh pondasi perekonomian rakyat melalui BUMNag Koto Gadang Jaya dengan sistem bagi hasil dimana adanya perjanjian kerja sama antara pemodal dan penggelola modal dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, jika dalam usaha tersebut mendapat keuntungan maka akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian".

"Menurut Bapak Jefri selaku anggota BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan bahwa untuk memperkokoh pondasi perekonomian rakyat melalui BUMNag Koto Gadang Jaya akad perjanjian kerja antara pemilik modal untuk mendirikan usaha dengan nisbah bagi hasil antara pemilik modal dengan tenaga kerja".

"Menurut Bapak Raden selaku anggota BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan bahwa untuk memperkuat ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan BUMNag maka harus ada kerja sama antara masyarakat yang bertindak sebagai tenaga kerja dengan masyarakat yang memiliki modal dengan hasil dibagi sesuai dengan kesepekatan awal".

"Menurut Bapak Rozi selaku anggota BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan bahwa untuk memperkuat ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan BUMNag maka harus ada masyarakat yang memiliki modal untuk melakukan kerja sama dengan masyarakat dibidang pertanian maupun bidang usaha lain dengan sistem bagi hasil"

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk memperkokoh pondasi perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dengan memanfaatkan BUMNag dengan menggunakan akad *akad* mudharabah mutlaqah yakni Dengan sistem bagi hasil dimana adanya perjanjian kerja sama antara pemodal dan penggelola modal dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, jika dalam usaha tersebut mendapat keuntungan maka akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama sesuai porsi sehingga tidak ada satu pihak yang dizholimi dan ini menjadi kekuatan bagi BUMNag dalam menjalankan usaha yang disukai masyarakat.

Prinsip pengelolaan BUMNag agar dapat memperkokoh pondasi perekonomian masyarakat Nagari Koto Gadang Jaya.

"Menurut Bapak Samsurizal selaku direktur BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan bahwa prinsip pengelolaan BUMNag agar dapat memperkokoh pondasi perekonomian yang utama adalah Prinsip kejujuran menanamkan sikap apa adanya berdasarkan fakta, situasi dan kondisi yang sebenarnya.

"Menurut Bapak Jefri selaku anggota BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan bahwa prinsip pengelolaan BUMNag agar dapat memperkokoh pondasi perekonomian dengan menanamkan prinsip otonomi menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, serta tanggung jawab. Orang yang mandiri berarti orang yang dapat mengambil keputusan lalu melaksanakannya berdasarkan kemampuan sendiri dan sesuai dengan apa yang diyakini, bebas dari tekanan, hasutan, dan ketergantungan kepada pihak lain

"Menurut Bapak Raden selaku anggota BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan bahwa prinsip pengelolaan BUMNag agar dapat memperkokoh pondasi perekonomian dengan prinsip saling menguntungkan menanamkan kesadaran untuk saling memberikan keuntungan satu sama lain, artinya dalam setiap tindakan bisnis harus diusahakan supaya semua pihak merasa diuntungkan.

"Menurut Bapak Rozi selaku anggota BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan bahwa prinsip pengelolaan BUMNag agar dapat memperkokoh pondasi perekonomian dengan prinsip keadilan menanamkan sikap untuk bersikap adil terhadap semua pihak yang terlibat pada BUMNag Koto Gadang Jaya, dengan tidak membeda-bedakan dari segala aspek yang terkandung dalam BUMNag.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa prinsip pengelolaan BUMNag agar dapat memperkokoh pondasi perekonomian masyarakat Nagari Koto Gadang Jaya dengan menerpakan beberapa prinsip yakni prinsip amanah (jujur), prinsip otonomi menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, serta tanggung jawab, serta prinsip saling menguntungkan dengan cara membeda-bedakan dari segala aspek yang terkandung dalam BUMNag. sehingga mampu mensejahterakan masyarakat Koto Gadang Jaya.

Oprasional BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya bisa berjalan dengan lancar.

"*Menurut Bapak Samsurizal selaku direktur BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan bahwa pelaksana operasional BUMNag sekurang-kurangnya dijabat oleh direktur, sekretaris dan bendahara. Sementara sejajar dengan pelaksana operasional terdapat pengawas/dewan pengawas BUMNag.*

"Menurut Bapak Jefri selaku anggota BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan bahwa pelaksana operasional merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa, dan mempunyai tugas untuk mengurus dan mengelola BUMNag sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

"Menurut Bapak Raden selaku anggota BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan bahwa oprasional BUMnag dapat dilakukan dengan adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sudah disepakati seluruh pihak yang terlibat seperti direktur, sekretaris dan bendahara dan anggotanya.

"Menurut Bapak Rozi selaku anggota BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan bahwa pelaksana operasional BUMNag harus ada struktur oraganisasi yang jelas dibentuk sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga agar mampu menyesuaikan dengan skala usaha yang akan didirikan".

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa oprasional BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya bisa berjalan dengan lancar apabila sudah jelas struktur organisasi yang dibentuk berdasarkan hasil rapat anggaran dasar rumah tangga yang dibentuk oleh pemerintah nagari dan sesuai dengan bidang usaha yang akan dijalankan. Usaha yang didirikan harus mampu menjadi solusi dan wadah tempat pengaduan masyarakat Koto Gadang Jaya dalam mendapatkan nilai ekonomi sehingga mampu mencapai kesejahteraan.

Peran badan usaha milik nagari BUMNag Koto Gadang Jaya yang utama dilakukan dalam menjalankan usaha yakni memerlukan strategi dalam upaya pencapaian target hal ini dikarenakan peran BUMNag Koto

Gadang Jaya sebagai pembangunan ekonomi menjadi salah satu cara meningkatkan ekonomi nasional. Nagari merupakan pemerintahan terbawah yang langsung berhubungan dengan masyarakat dan langsung menjangkau sasaran riil dari pembangunan, untuk menunjang pertumbuhan ekonomi maka dibutuhkan program yang mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat Nagari[36]. Salah satu bentuk pembangunan penguatan ekonomi di nagari Koto Gadang Jaya adalah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).

Peran BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya secara aktif secara aktif dinagari Koto Gadang Jaya adalah lembaga usaha yang dibentuk oleh pemerintah nagari dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai nilai ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari Koto Gadang Jaya yang telah berperan dalam membantu masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan oprasional pertanian serta mampu meningkatkan hasil pengelolaan sumber daya alam dengan program bantuan biaya pinjaman kepada seluruh masyarakat pertanian untuk memenuhi kebutuhan pertanian dalam bentuk pengadaan kebutuhan pokok produksi pertanian[37].

[36] Febria Rahim and Nurul Hayatun Nufus, 'Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Di Nagari Jaho Kecamatan X Koto Menggunakan Analisis Swot', *MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1.2 (2021), 166–84 <https://doi.org/10.31958/mabis.v1i2.4619>.

[37] Maya Sari and others, 'Pemberdayaan Masyarakat Optimalisasi Ekonomi Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Melalui Inovasi Pengelolaan Sampah Di Nagari Tanjung Bonai Aur Kabupaten Sijunjung', *Seminar Nasional ADPI Mengabdi Untuk Negeri*, 1.1 (2020), 189–93 <https://doi.org/10.47841/adpi.v1i1.43>.

BUMNag dengan menggunakan akad *akad* mudharabah mutlaqah yakni Dengan sistem bagi hasil dimana adanya perjanjian kerja sama antara pemodal dan penggelola modal dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, jika dalam usaha tersebut mendapat keuntungan maka akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian, Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karekteristik umum dan landasan dasar bagi operasional BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya secara keseluruhan, secara syari'ah prinsip berdasarkan pada kaidah al mudharabah

Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola[38]. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Mudharabah dapat berupa mudharabah mutlaqah atau mudharabah muqayyadah.

prinsip pengelolaan BUMNag agar dapat memperkokoh pondasi perekonomian masyarakat Nagari Koto Gadang Jaya prinsip amanah (jujur), Dalam sistem ekonomi Syariah, peran kelembagaan sangatlah penting dalam mewujudkan falah secara Bersama Bukan hanya pelaku

[38] Fariz Al-Hasni, 'Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9.2 (2017), 208–22.

pasar, konsumen dan produsen, namun Islam menyadari akan pentingnya otoritas pengawasan pasar karena potensi perilaku amoral para pelaku ekonomi dan kegagalan pasar dalam mewujudkan falah[39]. Institusi itu dapat bersifat formal, seperti pasar, pemerintah, peraturan atau institusi legal lainnya, ataupun institusi informal seperti adat, budaya, keyakinan dan agama. Perbedaan keadaan institusi akan berpengaruh besar dalam tingkat usaha dan kebijakan yang diperlukan untuk menuju sistem ekonomi Islam yang ideal.

Pengembangan masyarakat merupakan komitmen dalam memberdayakan masyarakat pada lapisan bawah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan yang nyata menyangkut masa depannya. Masyarakat lapis bawah umumnya terdiri atas orang-orang lemah, tidak berdaya dan miskin karena tidak memiliki sumber daya atau tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol sarana produksi. Pada umumnya mereka terdiri dari buruh, petani, penggarap, petani berlahan kecil, para nelayan, masyarakat hutan, kalangan pengangguran, serta orang-orang yang dibuat marginal karena umur, keadaan gender, ras, dan etnis. Semua kegiatan yang menyangkut pengembangan masyarakat diarahkan untuk membentuk sebuah struktur masyarakat yang mencerminkan tumbuhnya semangat swadaya serta partisipasi[40]. Pengembangan masyarakat diantaranya yaitu usaha memperkuat interaksi sosial dalam masyarakat,

[39] Ayada Ulufal Qolbi and others, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia', *Jurnal Sahmiyya*, 2.1 (2023), 19–30.

[40] Nidia Anggreni Das and others, 'Penguatan Lembaga Bumnag Puro Nagari Koto Laweh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok', *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1.11 (2022), 2041–52.

menumbuhksn semangat kebersamaan, sifat solidaritas diatara anggota masyarakat serta membantu mereka untuk berkomunikasi dengan pihak lain dengan cara berdialog secara alami atau tanpa intervensi, didasari penuh pemahaman serta ditindaklanjuti dengan aksi sosial nyata.

Oprasional BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya bisa berjalan dengan lancar apabila sudah jelas struktur organisasi yang dibentuk berdasarkan hasil rapat anggaran dasar rumah tangga yang dibentuk oleh pemerintah nagari dan sesuai dengan bidang usaha yang akan dijalankan. Tujuan akhir BUMNag sebagai instrumen merupakan modal sosial (social capital) yang diharapkan menjadi primadona dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disamping itu, perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (*goodwill*)[41] dari pemerintahan di atasnya untuk mengeliminir rendahnya surplus kegiatan ekonomi nagari disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah nagari.

Pengelolaan keuangan sangat penting bagi kelangsungan usaha. Informasi dan perkembangan usaha dapat dilihat dari aktifitas keuangan, yakni informasi terkait kegiatan bisnis seperti posisi/keadaan asset, utang, ekuitas perusahaan, aliran kas, pendapatan dan laba, perencanaan keuangan dan analisis keuangan. selain berperan sebagai sebagai sumber

[41] Syahrul Hamidi, Busyra Azheri, and Wetria Fauzi, 'Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari (BUMnag) Gadut Sejahtera Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang', *UNES LAW REVIEW*, 6.1 (2023), 1602–14.

informasi, catatan keuangan juga dipergunakan sebagai alat komunikasi antara pelaku usaha dengan pemilik modal.

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) atau di daerah lain lebih dikenal dengan istilah Badan Usaha Milik Desa termasuk salah satu pilar kegiatan ekonomi yang berada pada tataran Nagari yang memiliki fungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan juga bersifat komersial (commercial institution). Sebagai lembaga sosial BUMNag berfungsi atas kepentingan publik/sosial melalui penyediaan layanan dan jasa publik, sedangkan BUMNag sebagai lembaga komersial memiliki arti bahwa BUMNag tersebut bertujuan untuk mencari laba melalui penawaran barang dan jasa kepasar. Sehingga disini Nagari dituntut secara mandiri untuk mampu menggali potensi dan kekayaan yang ada didaerah Nagarinya untuk dijadikan sebagai aset dan sumber pemasukan keuangan Nagari.

BUMNag juga tergolong kedalam salah satu badan usaha alternatif yang perlu di perhatikan dan dikembangkan guna untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat Nagari. Sebagai sebuah instrument dalam penguatan otonomi Nagari, BUMNag ditujukan untuk mampu mendorong pemerintah Nagari dalam melakukan inovasi dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki Nagarinya sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya, sementara itu BUMNag dikatakan sebagai instrumen kesejahteraan rakyat jika BUMNag mampu melibatkan dan memberdayakan masyarakat setempat untuk mengelolanya, dengan tujuan

bisa untuk mengurangi tingkat penganguran dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Nagarinya.

Pemerintah Nagari dituntut secara mandiri untuk mampu menggali kekayaan dan potensi-potensi yang ada Nagariya untuk dijadikan sebagai aset dan sumber pemasukan keuangan Nagari, serta dituntut mampu melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari secara mandiri. Nagari sebagai bentuk dari satu kesatuan masyarakat otonom, tentunya memiliki aset sumber daya kekayaan nagari yang bisa dikelola untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi Nagari yang dikelola sesuai dengan kemampuan dan kewenangan secara mandiri, secara baik dan secara profesional, karena pada hakikatnya masyarakat akan lebih mudah berkembang sesuai dengan potensi-potensi yang dimilikinya. BUMNag juga tergolong kedalam salah satu badan usaha alternatif yang perlu di dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nagari, dengan tujuan mampu melahirkan suatu sumber daya ekonomi baru ditataran Nagari untuk memanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat di Nagarinya.

Pembangunan ekonomi menjadi salah satu cara meningkatkan ekonomi nasional. Desa merupakan pemerintahan terbawah yang langsung berhubungan dengan masyarakat dan langsung menjangkau sasaran riil dari pembangunan, untuk menunjang pertumbuhan ekonomi maka dibutuhkan program yang mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa. Salah satu bentuk pembangunan penguatan ekonomi di

desa adalah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)[42].

Keberadaan BUMNag ini diharapkan mampu mendorong kehidupan ekonomi di pedesaan. Adanya aturan ini membuat pemerintah untuk dapat memulai mendirikan Badan Usaha Milik Nagari serta mulai menerapkannya pada desa-desa atau dengan nama lainnya yang setara desa. Undang-Undang tentang Desa ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di Desa atau sebutan dengan nama lain seperti Nagari di Sumatera Barat, segala potensi di daerah juga dapat lebih diberdayakan untuk kesejahteraan rakyat. Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fsik maupun pembanguan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, penerapan era desentralisasi pun menjadikan daerah-daerah memiliki otonomi yang seluas- luasnya untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing.

Sumatera Barat memliki Sumber Daya Alam yang cukup besar, Sumber Daya Alam Itu bersumber dari berbagai bidang yaitu bidang perkebunan, pertanian, pertambangan, pariwisata, perikanan, industri kecil dan menengah serta jasa dan perdagangan. Sumatera memiliki keadaan geografis yang cukup bagus. Keindahan alam di Provinsi Sumatera Barat

[42] Sari and others.

menjadikannya daya tarik bagi para wisatawan untuk berkunjung secara langsung, baik itu wisatawan domestic maupun manca negara sehingga peran BUMNag sangat dibutuhkan sebagai instrumen pengerak agar menjadi nilai tambah dalam ekonomi masyarakat sehingga masyrakat bisa memiliki tingkat kesejahteraan yang meningkat[43].

2. Kendala BUMNag Koto Gadang Jaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Kendala halangan dan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran tujuan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa kendala BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya yang sering dihadapinya dianranaya adalah sebagai berikut:

Hambatan yang sering terjadi sehingga BUMNag Koto Gadang Jaya

"Menurut Bapak Samsurizal selaku direktur BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan hambatan yang terjadi yakni keseriusan semua pihak khususnya Nagari dalam memberikan permodalan dalam pengelolaan BUMNag ini menjadi salah satu perhatian".

"Menurut Bapak Jefri selaku anggota BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan bahwa hambatan yang sering terjadi bahkan lumrah pada BUMNag permasalahan mendasar bagi setiap BUMNag adalah kesulitan keuangan. Tentunya dalam permasalahan ini bagi BUMNag yang sehat dan memperoleh laba setiap tahunnya memiliki peluang untuk diprivatisasi guna mendapatkan pendanaan".

"Menurut Bapak Raden selaku anggota BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan bahwa hambatan yang sering terjadi pengelolaan kurang efisien; cenderung lambat dalam mengambil keputusan karena pemilik modal adalah pemerintah karena harus melalui birokrasi yang panjang

"Menurut Bapak Rozi selaku anggota BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan bahwa hambatan yang sering terjadi seperti sering mengalami kerugiaan karena sifat usahanya yang mengutamakan kepentingan publik daripada pertimbangan ekonomi".

[43] M.Hidayatul Halim, 'Kendala-Kendala Realisasi Pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) : Studi Di Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam', *Jurnal Sosiologi Andalas*, 6.1 (2020), 12–24 <https://doi.org/10.25077/jsa.6.1.12-24.2020>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat pada BUMNag Koto Gadang Jaya maka dapat disimpulkan kendala yang sering terjadi yaitu keseriusan para pemiliki modal dalam menyalurkan modal yang masih tergolong minim, kesulitan keuangan yang paling mendasar terjadi disetiap saat di BUMNag Koto Gadang Jaya. BUMNag Koto Gadang Jaya sering mengalami kerugian diakibatkan dalam mengambil keputusan lebih cendrung mementingkan keperluan orang banyak.

Anggaran yang dianggari pemerintah Nagari Koto Gadang Jaya menjadi faktor terhambatanya kesejahteraan masyarakat

"Menurut Bapak Samsurizal selaku direktur BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan anggaran yang dianggari pemerintah Nagari Koto Gadang Jaya sangat penting jika anggaran yang ditetapkan dibawah yang dibutuhkan maka akan menjadi hambatan BUMNag Koto Gadang Jaya.

"Menurut Bapak Jefri selaku anggota BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan bahwa anggaran yang diajukan pemerintah nagari menjadi faktor yang dominan dalam oprasional BUMNag dikarenakan anggaran yang diterima berada dibawah dana yang dianggarkan pihak pengelaola Koto Gadang Jaya.

"Menurut Bapak Raden selaku anggota BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan bahwa anggaran pemerintah akan menjadi hambatan dikarenkan jika semakin besar anggaran yang diberikan maka akan bisa mendukung BUMNag Koto Gadang Jaya lebih produktif sehingga masyarakat bisa sejahtera."

"Menurut Bapak Rozi selaku anggota BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan bahwa anggaran sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diakrenakananggaran yang cukup membuat fasilitas masyarakat lebih memadai dalam aktivitas memperoleh nilai ekonomi."

Berdasarkan hasil wawncara dengan beberapa pihak yang terlibat pada BUMNag Koto Gadang Jaya mengenai anggaran yang dianggari pemerintah Nagari Koto Gadang Jaya akan menjadi faktor terhambatanya dalam meingkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dianulir bahwa jika

jumlah anggaran yang dianggari minimum maka fasilitas yang didapatkan masyarakat akan tergolong tidak memadai. Dan apabila anggaran yang diberikan memadai tentu fasilitas yang dapat digunakan masyarakat tentu lebih memadai sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan produktivitas sehingga masyarakat akan lebih sejahtera.

Pendapatan masyarakat bisa diperoleh secara penuh dari hasil BUMNag.

"Menurut Bapak Samsurizal selaku direktur BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan pendapatan masyarakat nagari Koto Gadang Jaya tidak sepenuhnya berasal dari BUMNang tetapi hanya sebagian masyarakat bisa dibantu melalui program yang disediakan oleh BUMNag Koto Gadang Jay".

"Menurut Bapak Jefri selaku anggota BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan bahwa pendapatan masyarakat nagari Koto Gadang Jaya diperoleh dari hasil pertanian hanya sebagian dari petani yang bermitra dengan BUMNag".

"Menurut Bapak Raden selaku anggota BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan bahwa masyarakat nagari Koto Gadang Jaya memperoleh pendapatan sehar-hari rata masyarakat memiliki profesi atau pekerjaan dibidang pertanian.

"Menurut Bapak Rozi selaku anggota BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan bahwa perolehan pendapatan masyarakat diperoleh dari hasil bidang pertanian dikarenakan BUMNag Koto Gadang Jaya belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara penuh atau keseluruhan."

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat pada BUMNag Koto Gadang Jaya dapat disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat dinagari Koto Gadang Jaya berasal dari hasil bidang pertanian secara menyeluruh masyarakat mengantungkan hidup pada bidang pertanian sebagai sumber utama pendapatan pokok dan BUMNag Koto Gadang jaya tidak bisa memfasilitasi seluruh masyarakat tetapi hanya sebagian dari masyarakat yang bisa menadi mitra dan bisa didukung oleh

BUMnag untuk masyarakat bisa memperoleh nilai ekonomi agar bisa menjadi masyarakat yang sejahtaera".

Kendala dalam menentukan jenis usaha yang memungkinkan dan menguntungkan dijalankan oleh BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya.

"Menurut Bapak Samsurizal selaku direktur BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan kendala yang sangat sering ditemukan yakni dikarenakan lingkungan masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda sehingga sulit untuk ditentukan oleh pihak BUMNag dalam mengambil keputusan".

"Menurut Bapak Jefri selaku anggota BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan bahwa kendala dalam menentukan usaha yang dianggap memiliki prospektif yang bagus untuk kedepanya sering terjadi masalah anggaran yang ada atau himpunan dana yang diperoleh dari hasil anggota belum memenuhi skala dalam penetapan jenis usaha yang direncanakan".

"Menurut Bapak Raden selaku anggota BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan bahwa kendala pada masyarakat yakni tidak Tahu Jenis Bisnis Apa yang Ingin Ditekuni. Hambatan pertama yang muncul saat mengelola ide bisnis adalah kurangnya pengetahuan mengenai skema usaha diera sekarang".

"Menurut Bapak Rozi selaku anggota BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan bahwa kendala dalam menentukan jenis usaha yang memungkinkan dan menguntungkan dijalankan oleh BUMNag kontrol ketat atas anggaran dan pembiayaan diterima BUMNag Koto Gadang Jaya yang dikatakan membangun image dimasyarakat yang belum mumpuni."

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat pada BUMNag Koto Gadang Jaya dapat disimpulkan bahwa kendala dalam menentukan jenis usaha yang memungkinkan dan menguntungkan dijalankan oleh BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya yakni pandangan dan persepsi masyarakat yang belum bisa singkron dengan program yang disediakan oleh BUMNag Koto Gadang Jaya dan image dari BUMNag Koto Gadang jaya belum secara pnuh menarik perhatian dari masyarakat nagari Koto Gadang Jaya".

Kendala yang sanggat sulit dihadapi BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya

"Menurut Bapak Samsurizal selaku direktur BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan kendala yang sanggat sulit dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat yang sering bertantangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pihak pengelola BUMNag.".

"Menurut Bapak Jefri selaku anggota BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan bahwa kendala yang sulit dihadapi oleh nagari Koto Gadang Jaya pada tahap pelaksanaan anggaran nagari adalah Kurang optimalnya dalam koordinasinya".

"Menurut Bapak Raden selaku anggota BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan bahwa kendala yang sulit dihadapi oleh BUMNag Koto Gadang Jaya pada tahap pelaksanaan anggaran nagari yang sering tidak sesuai dengan kebutuhan dari BUMNag Koto Gadang Jaya".

"Menurut Bapak Rozi selaku anggota BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan bahwa kendala yang sulit dihadapi mengenai keuangan yang bersifat sensitif hal ini dianulir pandangan masyarakat terhadap kapsitas atau perolehan sumber dana BUMNag Koto Gadang Jaya."

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat pada BUMNag Koto Gadang Jaya dapat disimpulkan bahwa kendala yang sanggat sulit dihadapi BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya adalah masalah keuangan besar kecilnya anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah nagari yang bersifat sensitif karena persepsi dari masyarakat banyak yang belum bisa percaya aliran keuangan yang dijalankan oleh usaha BUMNag dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi".

Masyarakat Nagari Koto Gadang Jaya bisa diajak bekerjasama dalam meningkatkan kesejahteraanya.

"Menurut Bapak Samsurizal selaku direktur BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan bahwa masyarakat Nagari Koto Gadang Jaya sebagian besar sudah bisa diajak untuk bekerja sama".

"Menurut Bapak Jefri selaku anggota BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan bahwa masyarakat Nagari Koto Gadang Jaya sebagian besar sudah mulai mengerti tentang penetapan kebijakan yang ditetapkan oleh pihak pengelola BUMNag Koto Gadang Jaya".

"Menurut Bapak Raden selaku anggota BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan bahwa sebagaian besar masyarakat bukan tidak bisa untuk diajak kerjasam melainkan mereka lebih fokus pada kegiatan usaha masing-masing hanya menganggap bahwa BUMNag sebagai produk bantuan dari pemerintah nagari".

"Menurut Bapak Rozi selaku anggota BUMNag Koto Gadang Jaya menyatakan bahwa untuk mengajak masyarakat kerja sama dalam menyelesaikan program yang realisasikan oleh BUMNag tidak begitu jadi masalah namun bertolak belakang dengan pekerjaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya."

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat pada BUMNag Koto Gadang Jaya dapat disimpulkan bahwa sudah sebagian dari masyarakat Nagari Koto Gadang Jaya bisa diajak bekerjasama dalam meningkatkan kesejahteraanya, dikarenakan kapasitas dari BUMNag belum begitu memumpuni dari program yang terealisasi dikarenakan pekerjaan utama atau sumber pendapatan utama menjadi prioritas bagi masyarakat dalam menjangkau ataupun menuju ke tingkat sosial ekonomi yang bisa digolongkan sejahtera.

Kendala yang dihadapi BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya yang sering terjadi yaitu keseriusan para pemiliki modal dalam menyalurkan modal yang masih tergolong minim, kesulitan keuangan yang paling mendasar terjadi disetiap saat di BUMNag Koto Gadang Jaya. BUMNag Koto Gadang Jaya sering mengalami kerugian diakibatkan dalam mengambil keputusan lebih cendrung mementingkan keperluan orang banyak. Pada prosesnya, pemerintahan desa atau setingkatnya dalam mendirikan BUMNag harus memperhatikan beberapa hal agar pendirian BUMNag bisa bermanfaat bagi masyarakat seperti memperhatikan inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa,

potensi usaha ekonomi desa, sumber daya alam di desa, sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMNag dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMNag[44].

BUMNag Koto Gadang Jaya mengenai anggaran yang dianggari pemerintah Nagari Koto Gadang Jaya akan menjadi faktor terhambatanya dalam meingkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dianulir bahwa jika jumlah anggaran yang dianggari minimum maka fasilitas yang didapatkan masyarakat akan tergolong tidak memadai. Pengelolaannya BUMNag Multi Usaha tidak terlepas dari kendala-kendala yang paling dominan mengenai masalah akumulasi modal sebagai pendukung untuk disediakannya pengelolaan BUMNag yang lebih penting untuk mempercepat lintas usaha yang realisasi serta memperbesar volume usaha[45].

Pendapatan masyarakat dinagari Koto Gadang Jaya berasal dari hasil bidang pertanian secara menyeluruh masyarakat mengantungkan hidup pada bidang pertanian sebagai sumber utama pendapatan pokok dan BUMNag Koto Gadang jaya tidak bisa memfasilitasi seluruh masyarakat tetapi hanya sebagian dari masyarakat yang bisa menadi mitra dan bisa didukung oleh BUMnag. Dengan adanya BUMnag diharapkan dapat memberikan hasil positif untuk kehidupan ekonomi di perdesaan.

[44] Halim.

[45] Riska Okta Vadila and Mega Rahmi, 'Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Pada Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya', *Jurnal Akuntansi Syariah (JAkSya)*, 2.2 (2022), 98 <https://doi.org/10.31958/jaksya.v2i2.5627>.

Pemberlakuan Undang-Undang Desa membuat pemerintah menerapkan kebijakan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa di tiap-tiap perdesaan di seluruh Indonesia. Adapun BUMDes ini memiliki nama lain seperti di Sumatera Barat disebut sebagai Badan Usaha Milik Nagari. Dengan demikian berdirinya BUMNag/BUMdes segala potensi yang dimiliki diharapkan dapat diberdayakan untuk peningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli nagari[46]. Oleh karena itu, nagari sebagai perwakilan negara pada pemerintahan dibawah mengharuskan untuk melaksanakan pembangunan yang dilakukan secara fisik atau perbaikan pada SDM, suatu bentuk upaya dari peningkatan kesejahteraan dan bentuk perbaikan kualitas hidup.

BUMNag Koto Gadang Jaya mengalami kendala dalam menentukan jenis usaha yang memungkinkan dan menguntungkan dijalankan oleh BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya yakni pandangan dan persepsi masyarakat yang belum bisa singkron dengan program yang disediakan oleh BUMNag Koto Gadang Jaya dan image dari BUMNag Koto Gadang jaya belum secara pnuh menarik perhatian dari masyarakat nagari Koto Gadang Jaya. BUMNag yang terdapat di Nagari Koto Gadang Jaya, masih ditemukan beberapa permasalahan yang belum sesuai dengan anggaran pendapatan yang tertuang secara tertulis, pengawasan belum berfungsi yang terbukti dengan belum adanya laporan tertulis dari

[46] Anisa Safitri and Jumiati, 'Efektivitas Badan Usaha Milik Nagari Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari Di Nagari Kataping Kabupaten Padang Pariaman', *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2.2 (2020), 90–97 <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i2.138>.

pengawas, belum adanya rapat berkala[47]. Dengan demikian keberadaan BUMNag menjadi tidak terarah atau tanpa tujuan.

Agar BUMnag benar benar memiliki peran dalam peningkatan perekonomian demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa maka diperlukan pengelolaan administrasi BUMNag yang memadai didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Namun sayangnya, kendala utama yang dihadapi BUMNag siapnya sumber daya manusia yang mereka miliki untuk melaksanakan pengelolaan bisnis. Ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan bisnis yang dimiliki oleh tim manajemen BUMNag. Terutama apabila manajemen harus menyiapkan laporan keuangan bisnis mereka, sementara terdapat gap antara contoh laporan bisnis yang harus diikuti dengan realitas bisnis yang mereka jalankan[48]. Pada saat BUMDes harus menyiapkan laporan keuangan manufaktur, SDM BUMDes kesulitan melaksanakan hal tersebut. Ini disebabkan karena pengetahuan tentang keuangan, tingkat kompetensi, lingkup organisasi yang kecildan komponen – komponen dalam forma laporan keuangan manufaktur yang komplek.

BUMNag Koto Gadang Jaya menghadapi kendala yang sanggat sulit dihadapi BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya adalah masalah keuangan besar kecilnya anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah

[47] Mutiara Putri and Hasbullah Malau, 'Kendala Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Taman Makmur Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan', *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 1.8 (2022), 611–19 <https://doi.org/10.58344/locus.v1i8.247>.

[48] Eka Siskawati and others, 'Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Unit Usaha Menggunakan Laporan Arus Kas Pada Badan Usaha Milik Nagari', *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat PNP*, 1.1 (2019), 31–36.

nagari yang bersifat sensitif karena persepsi dari masyarakat banyak yang belum bisa percaya aliran keuangan yang dijalankan oleh usaha BUMNag dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi. BUMNag berperan memperkecil rantai distribusi produk pangan, program BUMNag juga kami tujukan selain ruang untuk meningkatkan pergerakan ekonomi Nagari, juga untuk mengantisipasi gejolak harga dan gangguan pasokan pangan, maka dari anggaran sanggat memiliki peran yang sakral atas terealisasinya program usaha BUMNag Koto Gadang Jaya[49].

BUMNag Koto Gadang Jaya sudah sebagian dari masyarakat Nagari Koto Gadang Jaya bisa diajak bekerjasama dalam meningkatkan kesejahteraanya, dikarenakan kapasitas dari BUMNag belum begitu memumpuni dari program yang terealisasi dikarenakan pekerjaan utama atau sumber pendapatan utama menjadi prioritas bagi masyarakat dalam menjangkau ataupun menuju ke tingkat sosial ekonomi yang bisa digolongkan sejahtera. Menurut Sari dkk[50] menyatakan bahwa kontribusi dan dukungan masyarakat sagat dibutuhkan dalam proses oprasional BUMNag Koto Gadang Jaya jika masyarakat mampu secara aktif mendukung maka BUMNag Koto Gadang Jaya akan leluasa untuk lebih produktif dengan tujuan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai negara yang memiliki puluhan juta penduduk yang perlu disejaterahkan dan tersebar di berbagai wilayah administratif di Indonesia,

[49] Sutri Dahlena, Asdi Agustar, and Ira Wahyuni Syarfi, 'Eksistensi Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Nagari', *Jurnal Niara*, 16.1 (2023), 178–87 <https://doi.org/10.31849/niara.v16i1.14101>.

[50] Sari and others.

rasanya terlalu berat jika beban pembangunan nasional hanya dipikul kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu, sangat diperlukan pembangunan di setiap desa hingga terciptanya desa yang mandiri atau kemandirian desa sebagai pondasi pembangunan nasional. Di Provinsi Sumatera Barat desa dikenal dengan nagari (setara secara administratif). Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, desa mandiri atau nagari mandiri berarti mempunyai kekuatan secara ekonomi, budaya dan sosial melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan. Menjadi kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, serta dapat menampung berbagai kegiatan ekonomi masyarakat dengan tetap mengacu pada potensi lokal (asli nagari) merupakan cara kerja BUMNag agar tetap tumbuh dan berkembang hingga memberikan kontribusi bagi pendatan desa atau nagari.

Secara administratif Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 11 Kecamatan dengan 19 Nagari. Berdasarkan Peraturan Bupati No 12 Tahun 2015 Tentang Pembentukan, Pengelolaan dan Pegembangan BUMNag, maka semua Nagari sudah membentuk BUMNag yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati No 82 Tahun 2015[51]. Dengan demikian sudah berdiri sebanyak 19 Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Bila dirujuk kepada prinsip dasar berdirinya BUMNag maka seyogyanya lah unit usaha yang ada seharusnya selaras dengan kondisi perekonomian masyarakat pada nagari yang bersangkutan. Pada nagari yang ekonomi masyarakatnya

[51] Vadila and Rahmi.

berbasis perkebunan misalnya, maka unit usaha BUMNag bila terkait dengan kebutuhan usaha perkebunan akan memberikan manfaat langsung terhadap aktifitas ekonomi masyarak yang ada pada setiap nagari dengan kondisi perekonomian yang berbeda-beda. Potensi nagari yang ada tidak akan memberikan manfaat jika tidak ada pengembangan potensi. Narasumber menjelaskan bahwa disinilah peranan BUMNag dibutuhkan, pengurus BUMNag harus mampu menggali potensi nagari, memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat nagari. Pengurus BUMNag tidak boleh salah dalam memilih unit usaha yang akan dikembangkan. Model bisnis merupakan gambaran hubungan antara keunggulan dan sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengakuisisi dan menciptakan nilai, yang membuat perusahaan mampu menghasilkan laba.

Model bisnis dirancang untuk untuk menyederhanakan suatu kompleksitas bisnis agar dapat lebih mudah dipahami oleh orang awam atau orang yang tidak terlibat dalam usaha tersebut. Model bisnis menggambarkan secara rasional tentang bagaimana sebuah organisasi baik profit ataupun non profit, menciptakan, menyampaikan, dan menemukan nilai-nilai penting bagi pelanggan. Menurut Osterwalder dan Pigneur model bisnis adalah "*A business model describes the rationale of how an organization creates, delivers, and captures value" dan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai " How we plan to make money*. Semua badan usaha dapat dipastikan memiliki tujuan yang sama yaitu memperoleh

keuntungan sebesar-besarnya dari kegiatan dan pengembangan usahanya, oleh karena itu perlu sebuah atau beberapa model bisnis yang baik dan terukur agar usaha atau bisnis mempunyai saluran untuk mendapatkan keuntungan/uang[52]. Model bisnis akan dijadikan pedoman bagi badan usaha untuk menjalankan bisnisnya yaitu usaha yang betul-betul mempunyai value, mengembangkan potensi atau aset yang ada dan bertujuan untuk kesejahteraan Bersama.

Dengan demikian berdirinya BUMNag/BUMdessegala potensi yang dimiliki diharapkan dapat diberdayakan untuk peningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli nagari. Oleh karena itu, nagari sebagai perwakilan negara pada pemerintahan dibawah mengharuskan untuk melaksanakan pembangunan yang dilakukan secara fisik atau perbaikan pada SDM, suatu bentuk upaya dari peningkatan kesejahteraan dan bentuk perbaikan kualitas hidup.

BUMNag seluruhnya dilakukan oleh masyarakat nagari dan pemerintah nagari, yakni dari nagari, oleh nagari dan untuk nagari. Pendirian kelembagaan BUMNag ini sangat penting, sebab akan memberikan dampak dan manfaat kepada masyarakat nagari maupun nagari karena dapat memberikan keuntungan pada taraf perekonomian keduannya. Diharapkan Dengan lahirnya BUMNag dapat menjadi tonggak kesejahteraan bagi masyarakat, karena BUMNag didirikan berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat Desa, yaitu suatu kelompok masyarakat

[52] Adil Mubarak and Aldri Frinaldi, 'Penguatan Badan Usaha Milik Nagari Melalui Pelatihan Penyusunan Business Model Canvas', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6.5 (2022), 1282–90.

yang saling bekerja sama, bergotong royong untuk dapat meningkatkan perekonomiannya.

Terbentuknya struktur pengelola BUMNag Koto Gadang Jaya Nagari Koto Gadang Jaya baru mendorong pengelola untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki tata Kelola BUMNag untuk merevitalisasi unit usaha yang sudah ada dan mengembangkan gagasan inovasi unit usaha baru. Sebelum sebuah gagasan usaha direalisasikan maka sebaiknya di Nagari Koto Gadang Jaya harus ada studi kelayakan usaha terlebih dahulu. Studi kelayakan merupakan analisis terhadap suatu rencana usaha yang menyangkut berbagai aspek termasuk aspek pemasaran, operasi, SDM, yuridis, lingkungan, dan keuangan, sehingga diketahui rencana usaha tersebut layak atau tidak layak dilakukan Setelah memberikan motivasi dan materi tentang budaya kerja kewirausahaan, materi dilanjutkan dengan memberikan informasi kepada peserta tentang potensi apa yang bisa dikembangkan untuk menjadi unit usaha sebagai alternatif selain usaha yang sudah ada.

Pada sesi ini tim pengabdi meminta secara khusus kepada pemerintah terkait yang membidangi sektor pertanian dan perkebunan nagari yang menjadi fokus proses pendirian BUMNagari berlangsung cepat termasuk dalam penentuan nama BUMNagari, pengurus, AD/ART, dan besaran penyertaan modal pada BUMNagari. Wali Nagari sebagai pucuk pemerintahan di nagari dan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN) memiliki peran yang sangat

penting dalam pendirian BUMNagari[53]. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa adalah agen terdepan pemerintah untuk menjadi penggerak ekonomi kedepan, maka dari itu pemerintah membentuk program dengan membentuk suatu badan usaha atau disebut dengan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Nagari, menyebutkan bahwa : "Untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, maka didirikan badan usaha milik Nagari (BUMNag) sesuai dengan kebutuhan dan potensi Bumnag diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa.

Pendirian serta pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilaksanakan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainabel. Oleh karena itu, perlu adanya upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut agar dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri[54]. Untuk mencapai tujuan BUMNag dapat dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat desa melalui pelayanan distribusi barang maupun jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintahan desa

[53] Zamhasari and others, 'Dominasi Peran Wali Nagari Dalam Pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAGARI)', *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2.11 (2023), 4329–40.

[54] Yuliarti, Hidayatul Fajri, and Artha Dini Akmal, 'Explore Nagari's Potential For Strengthening BUMNag12 Suku In Nagari Salimpauang', *Jurnal Pengabdian*, 6.2 (2022), 348–58.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil studi yang membahas Analisis Peran BUMNag DALAM Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Nagarari Koto Gadang Jaya Kabupaten Pasaman Barat dari hasil penelitian yang mengali informasi dengan cara melakukan wawancara kepada pihak yang terkait seperti jajaran struktur organisasi pengurus BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya melakukan studi literatur dengan relavansi yang mebicarakan peran dan kendala yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peran badan usaha milik nagari BUMNag Koto Gadang Jaya yang utama dilakukan dalam menjalankan usaha yakni memerlukan strategi dalam upaya pencapaian target hal ini dikarenakan peran BUMNag Koto Gadang Jaya sebagai pembangunan ekonomi menjadi salah satu cara meningkatkan ekonomi nasional. Nagari merupakan pemerintahan terbawah yang langsung berhubungan dengan masyarakat dan langsung menjangkau sasaran riil dari pembangunan, untuk menunjang pertumbuhan ekonomi maka dibutuhkan program yang mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat Nagari.
2. Kendala yang dihadapi BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya yang sering terjadi yaitu keseriusan para pemiliki modal dalam menyalurkan modal yang masih tergolong minim, kesulitan keuangan yang paling mendasar terjadi disetiap saat di BUMNag Koto Gadang Jaya. BUMNag Koto Gadang Jaya sering mengalami kerugian diakibatkan dalam mengambil keputusan lebih cendrung mementingkan keperluan orang banyak. Pada

prosesnya, pemerintahan desa atau setingkatnya dalam mendirikan BUMNag harus memperhatikan beberapa hal agar pendirian BUMNag bisa bermanfaat bagi masyarakat seperti memperhatikan inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa, potensi usaha ekonomi desa, sumber daya alam di desa, sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMNag.

B. Saran

Dalam melakukan studi ini peneliti menyadari terdapat banyak kekurangan yang dirasakan peneliti baik dari segi teoritis maupun perolehan ketajaman analisis dalam studi hasil studi, maka dari itu peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Diaharpakan kepada peneliti selanjutnya bisa menjadikan kekurangan dalam penelitian sebagai urgensi atau masalah dalam penetapan anggaran nagari dalam perspektif islam.
2. Diaharapkan para peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan pengembangan strategi menggunakan SWOT analisis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat mebedah kebijakan yang sesuai dengan perhitungan biaya oprasional yang bisa memumpuni fasilitas BUMNag nagari Koto Gadang Jaya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hasni, Fariz, 'Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9.2 (2017), 208–22

Amandin, and Yelli Aswariningsih, 'The Role Of Bumdes Towards Economic Improvement Of The Community In Prabumulih City Village', *Journal of Economic, Business and Accounting*, 6.1 (2022), 877–94

Apriliana, Eka Sri, 'Upaya Peningkatan Pendapatan Nasional Di Tengah Wabah Virus Corona Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 6.1 (2020), 19–28

Basri, Ikhwan Abidin, *Islam Dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2009)

———, *Islam Dan Pembangunan Ekonomi Masyrakat* (Jakarta: Gema Insani Press, 2009)

Boediono, *Pengantar Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2022)

Das, Nidia Anggreni, Edi Firnando, Yulhan, Yendi Putra, Rita Dwi Putri, Witra Maison, and others, 'Penguatan Lembaga Bumnag Puro Nagari Koto Laweh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok', *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1.11 (2022), 2041–52

Dima, Enike Tje Yustin, 'Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa Kuanheun Kabupaten Kupang Barat', *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1.3 (2022), 612–18

Dirdjosiswor, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindopersada, 2003)

Dumairy, Syamsul Hadi, and Muhammad, 'Model Perhitungan Pendapatan Nasional Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal CMES*, XI.2 (2018), 174–86

Halim, M.Hidayatul, 'Kendala-Kendala Realisasi Pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) : Studi Di Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam', *Jurnal Sosiologi Andalas*, 6.1 (2020), 12–24 <https://doi.org/10.25077/jsa.6.1.12-24.2020>

Hamidi, Syahrul, Busyra Azheri, and Wetria Fauzi, 'Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari (BUMnag) Gadut Sejahtera Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang', *UNES LAW REVIEW*, 6.1 (2023), 1602–14

Khairinnisa, and Citra Indah Merina, 'SEIKO : Journal of Management & Business Analisis Kontribusi Pengelolaan BUMDes Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Pendapatan Asli Desa Di Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul', *Journal of Management & Business ISSN*, 4.3 (2022), 104–12 <https://doi.org/10.37531/sejaman.v4i3.2399>

Leunupun, Engrith Grafelia, and Dolveci Aktawlora, 'Peran Bumdes Dalam Membangun Kewirausahaan Dan Kemandirian Desa (Studi Kasus Pada Desa Tomra)', *Kupna Jurnal*, 3.1 (2022), 57–70

Lubis, Ali Topan, 'Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Islam', *JIBF MADINA*, 1.1 (2020), 53–67

Mubarak, Adil, and Aldri Frinaldi, 'Penguatan Badan Usaha Milik Nagari Melalui

Pelatihan Penyusunan Business Model Canvas', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6.5 (2022), 1282–90

Mubarok, Achmad, *Psikologi Keluarga* (Malang: Madani, 2016)

Pradnyani, Ni Luh Putu Sri Purnama, 'Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara', *Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani*, 9.2 (2019), 39–47

Putri, Kiki Meisya, Muhammad Arif, and Sri Ramadhani, 'Analisis Peran Pengembangan Desa Wisata Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Kaitannya Pada Pencapaian Sustainable Development Goals (Studi Kasus Desa Wisata Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang)', *JUMSI*, 2.4 (2022), 1029–37

Putri, Mutiara, and Hasbullah Malau, 'Kendala Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Taman Makmur Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan', *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 1.8 (2022), 611–19 <https://doi.org/10.58344/locus.v1i8.247>

Qolbi, Ayada Ulufal, Husni Awali, Drajat Stiawan, and Happy Sista Devy, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia', *Jurnal Sahmiyya*, 2.1 (2023), 19–30

Rahim, Febria, and Nurul Hayatun Nufus, 'Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Di Nagari Jaho Kecamatan X Koto Menggunakan Analisis Swot', *MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1.2 (2021), 166–84 <https://doi.org/10.31958/mabis.v1i2.4619>

Safitri, Anisa, and Jumiati, 'Efektivitas Badan Usaha Milik Nagari Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari Di Nagari Kataping Kabupaten Padang Pariaman', *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2.2 (2020), 90–97 <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i2.138>

Salihin, Agus, Universitas Islam, Negeri Sunan, Kalijaga Yogyakarta, and A Pendahuluan, 'Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanggik', *Al-Intaj*, 6.6 (2012), 96–104

Saputra, Boni, Lince Magriasti, and Dwi Finna Syolendra, 'Penguatan Kapasitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari Bukit Gadang Mandiri Dalam Pengelolaan Sumber Kekayaan Nagari', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6.2 (2022), 547

Sari, Maya, Venny Haris, Hadiyati Idrus, Najmiatul Fajar, Roza Helmita, and Aidhya Irhash Putra, 'Pemberdayaan Masyarakat Optimalisasi Ekonomi Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Melalui Inovasi Pengelolaan Sampah Di Nagari Tanjung Bonai Aur Kabupaten Sijunjung', *Seminar Nasional ADPI Mengabdi Untuk Negeri*, 1.1 (2020), 189–93 <https://doi.org/10.47841/adpi.v1i1.43>

Siskawati, Eka, Armel Yentifa, Fitra Oliyan, and Wiwik Andriani, 'Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Unit Usaha Menggunakan Laporan Arus Kas Pada Badan Usaha Milik Nagari', *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat PNP*, 1.1 (2019), 31–36

Soekartawi, *Faktor-Faktor Produksi* (Jakarta: Salemba Empat, 2012)
Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)
———, *Sugiyono, Menyusun Skripsi, Tesis, Dan Disertasi* (Bandung: Cv. Alfabeta, 2015)
Sugyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Cv. Alfabeta, 2017)
Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat,* (Bandung: PT Refika Pertama, 2015)
Sutri Dahlena, Asdi Agustar, and Ira Wahyuni Syarfi, 'Eksistensi Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Nagari', *Jurnal Niara*, 16.1 (2023), 178–87 <https://doi.org/10.31849/niara.v16i1.14101>
Vadila, Riska Okta, and Mega Rahmi, 'Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Pada Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya', *Jurnal Akuntansi Syariah (JAkSya)*, 2.2 (2022), 98 <https://doi.org/10.31958/jaksya.v2i2.5627>
'Wawancara Dengan Bapak Apriyadi Selaku Anggota Kelompok Tani Desa Koto Gadang', 2023
'Wawancara Sapudin Selaku Wali Nagari Koto Gadang Jaya', 2023
Wijaya, David, *BUM DESA Badan Usaha Milik Desa* (Yogyakarta: Gava Media, 2018)
Yopanggi, Randi, Muharir, and Bagus Setiawan, 'Peran Dan Pengelolaan BUMDes Anugerah Terhadap', *Qonuni*, 2.01 (2022), 37–40
Yulian, Dewi Inayah Ratna, 'Peran (BUMDes) "Maju Bersama" Dalam Pengembangan Ekonomi Di Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2.1 (2022), 114–25
Yuliarti, Hidayatul Fajri, and Artha Dini Akmal, 'Explore Nagari's Potential For Strengthening BUMNag12 Suku In Nagari Salimpauang', *Jurnal Pengabdian*, 6.2 (2022), 348–58
Yusuf Qardawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema insani Press, 1997)
Zamhasari, Suryaningsih, Tengku Fahrul Gafar, and Rianda Prima Putri, 'Dominasi Peran Wali Nagari Dalam Pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAGARI)', *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2.11 (2023), 4329–40

LAMPIRAN I

ANALISIS PERAN BUMNAG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI NAGARARI KOTO GADANG JAYA KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nama :
Umur :
Pendidikan Terakhir :
Jabatan :
Masa Kerja :

A. Profil BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya

1. Bagaimana sejarah berdiri BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya?
2. Siapa saja yang terlibat dalam pendirian BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya?
3. Bagaimana Visi dari berdirinya dari BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya?
4. Bagaimana Visi dari berdirinya dari BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya?
5. Berapa Jumlah anggota BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya?

B. Rumusan masalah

1. Bagaiamana strategi untuk melakukan pembangunan dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat nagari Koto Gadang Jaya?
2. Bagaiamana peran secara aktif BUMNag dalam upaya meningkatan kualitas kehidupan masyarakat nagari Koto Gadang Jaya.?
3. Bagaimana memperkokoh pondasi perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dengan memanfaatkan BUMNag?
4. Bagaimana prinsip pengelolaan BUMNag agar dapat memperkokoh pondasi perekonomian masyarakat Nagari Koto Gadang Jaya?

5. Bagaimana oprasional BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya bisa berjalan dengan lancar?

C. Kendala Yang Dialami BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya

1. Apakah hambatan apa yang sering terjadi sehingga BUMNag Koto Gadang Jaya ?
2. Apakah anggaran yang dianggari pemerintah Nagari Koto Gadang Jaya menjadi faktor terhambatanya kesejahteraan masyarakat?
3. Apakah pendapatan masyarakat bisa diperoleh secara penuh dari hasil BUMNag?
4. Apakah kendala dalam menentukan jenis usaha yang memungkinkan dan menguntungkan dijalankan oleh BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya?
5. Apakah kendala yang sanggat sulit dihadapi BUMNag Nagari Koto Gadang Jaya?
6. Apakah masyarakat Nagari Koto Gadang Jaya bisa diajak bekerjasama dalam meningkatkan kesejahteraanya?

LAMPIRAN II

DOKUMENTASI






REDMI NOTE 7
GIANDRA
2023/11/2 09:19


REDMI NOTE
GIANDRA
2023/11/2 09:27